

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang Penelitian**

Pertumbuhan perusahaan saat ini semakin berkembang pesat. Para pengusaha bersaing untuk mengembangkan perusahaan agar lebih maju dan unggul dibandingkan perusahaan lainnya. Salah satu tindakan yang memajukan perkembangan perusahaan yaitu melibatkan pihak ketiga atau jasa akuntan publik. Jasa akuntan publik akan semakin dibutuhkan oleh pihak perusahaan, hal ini disebabkan pihak perusahaan memerlukan jasa akuntan publik untuk menentukan keandalan pertanggung jawaban laporan keuangan. Untuk menghasilkan laporan audit yang berkualitas, maka seorang auditor diharuskan melaksanakan prosedur audit sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP).

Prosedur audit merupakan langkah-langkah yang harus dijalankan auditor dalam melaksanakan pemeriksaan audit dan sangat diperlukan oleh auditor agar tidak melakukan penyimpangan dan dapat bekerja secara efektif dan efisien. Adapun prosedur audit yang bisa dilakukan oleh auditor meliputi pemahaman bisnis dan industri klien, pertimbangan pengendalian internal, pertimbangan auditor atas fungsi audit intern, informasi asersi manajemen, prosedur analitik, proses konfirmasi, pengendalian teknik audit berbantuan komputer, sampling audit, dan perhitungan fisik persediaan dan kas. Dengan melakukan prosedur audit, auditor dapat memperoleh bahan-bahan bukti yang cukup untuk

mendukung pendapatnya mengenai kewajaran atas laporan keuangan yang diaudit. Namun karena ketatnya persaingan dan meningkatnya permintaan audit, menimbulkan kekhawatiran tentang pemenuhan kualitas audit.

Auditor melakukan penyimpangan-penyimpangan dalam audit dengan cara mengambil jalan pintas yang akan melanggar kode etik akuntan publik dan dapat menurunkan kualitas audit dan akhirnya berdampak pada rendahnya kepercayaan pemakai terhadap laporan audit yang dihasilkan oleh auditor. Rendahnya kepercayaan pemakai laporan audit tentang pelaksanaan prosedur audit menjadi ancaman bagi profesi auditor.

Menurut Suryanita et al. (2007) beberapa bentuk tindakan yang menyebabkan pengurangan kualitas audit, adalah antara lain mengurangi jumlah sampel dalam audit, melakukan review dangkal terhadap dokumen lain, tidak memperluas pemeriksaan ketika terdapat pos yang dipertanyakan, dan memberikan opini ketika semua prosedur audit belum dilaksanakan secara lengkap.

Dalam berbagai teori sudah dinyatakan secara jelas bahwa proses audit yang baik adalah audit yang bisa meningkatkan kualitas informasi sekaligus dengan konteks yang terkandung di dalamnya, namun dalam prakteknya terdapat perilaku auditor yang dapat menyebabkan berkurangnya kualitas audit yang dilakukan oleh mereka. Salah satu bentuk perilaku pengurangan kualitas audit yang sering dilakukan auditor adalah penghentian prematur atas prosedur audit. Praktik ini berhubungan dengan pengabaian atau bahkan penghentian terhadap prosedur- prosedur yang harus dilaksanakan dalam program audit, auditor tidak

melakukan prosedur tersebut secara tuntas, tetapi auditor memberikan suatu opini audit sebelum auditor melakukan pekerjaannya secara tuntas (Coram et al., 2008 dalam Dyana Esty (2020)).

Praktik penghentian prematur atas prosedur audit yang terjadi tentu saja sangat berpengaruh secara langsung terhadap kualitas laporan audit yang dihasilkan auditor karena apabila salah satu langkah dalam prosedur audit dihilangkan maka kemungkinan auditor membuat judgment yang salah akan semakin tinggi. Kesalahan pembuatan opini atau judgment yang disebabkan karena auditor tidak melakukan prosedur audit yang mencukupi dapat menyebabkan auditor dituntut secara hukum (Heriningsih, 2001 dalam Dyana Esty (2020)).

Menurut Alderman dan Deitrick (1982) dalam Weningtyas, dkk. (2006), ada beberapa alasan mengapa auditor melakukan penghentian prematur atas prosedur audit yaitu terbatasnya jangka waktu pengauditan yang ditetapkan, anggapan bahwa prosedur audit yang dilakukan tidak penting, prosedur audit tidak material, prosedur audit yang kurang dimengerti, terbatasnya waktu penyampaian laporan audit, serta adanya pengaruh faktor kebosanan dari auditor sehingga dari alasan-alasan tersebut dapat disimpulkan bahwa penghentian prematur atas prosedur audit disebabkan oleh faktor karakteristik personal auditor, di mana faktor karakteristik tersebut merupakan faktor internal dan faktor situasional saat melakukan audit yang merupakan faktor eksternal.

Faktor-faktor yang mempengaruhi seorang auditor dalam melakukan praktik penghentian prematur atas prosedur audit adalah *time pressure*,

perencanaan supervisi yang kurang baik, faktor risiko audit, materialitas, prosedur review, dan kesadaran etis (Bayu, 2013:4). Praktik penghentian prematur atas prosedur audit banyak dilakukan oleh auditor. Seorang auditor mungkin akan menerima dan melakukan penghentian prematur atas prosedur audit dengan tujuan untuk tetap bisa bertahan dalam pekerjaan mereka. Sementara auditor lain memilih untuk tidak melakukan penghentian prematur atas prosedur audit dengan tujuan untuk menghindari dampak negatif apabila perilaku tersebut terdeteksi oleh perusahaan tempat auditor bekerja (Srimindarti, 2012).

Penghentian prematur atas prosedur audit juga dimungkinkan terjadi karena pengaruh tindakan supervisi yang disinyalir sebagai faktor eksternal. Pengendalian atas penghentian pekerjaan lebih dini merupakan hal yang sangat penting pada setiap Kantor Akuntan Publik. Penghentian pekerjaan lebih dini akan menyebabkan perubahan tidak dapat dipertanggungjawabkan dalam perencanaan audit, karena akan menghasilkan suatu tingkat risiko audit aktual yang tidak terkontrol dan tidak diketahui. Untuk mengontrol hal ini maka Kantor Akuntan Publik harus menyediakan tindakan supervisi. Supervisor yang berorientasi pada pekerjaan, ikut menentukan tujuan yang akan dicapai, membantu memecahkan masalah, menyediakan dukungan sosial dan material serta memberikan umpan balik atas kinerja bawahan, serta membantu mengurangi kebingungan peran dan ketidakpastian yang dialami bawahan sehingga kepuasan kerja bawahannya akan meningkat.

Fenomena terkait dengan penghentian prematur prosedur audit terjadi pada PT. Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk (AISA) untuk tahun buku 2017 yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan- RSM Indonesia. Laporan keuangan untuk tahun buku 2017 ditolak investor dan pemegang saham karena ada dugaan penyelewengan dana. Direktur utama TPS Food merasa bahwa salah satu pemegang sahamnya KKR melakukan *hostile take over* atau pengambilalihan paksa. Komisaris mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) dengan agenda penggantian direksi. Pihak direksi yang dipimpin Joko Mogoginta menolak untuk hadir dengan alasan RUPSLB itu tidak sah, tetapi pemegang saham justru menyetujui penggantian manajemen perusahaan, mengangkat Hengky Koestanto sebagai nahkoda perusahaan yang baru. Dalam laporan hasil investigasi Pt. Ernst & Young Indonesia (EY) kepada manajemen baru AISA, ada dugaan penggelembungan dana, ditemukan fakta bahwa direksi lama melakukan penggelembungan dana senilai Rp. 4 triliun.

Forum Investor Retail AISA (Forsa) mengajukan surat mengenai adanya indikasi pelanggaran atas audit AISA untuk laporan keuangan 2017 ke Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Dalam surat balasan dari Kemenkeu tersebut, disebutkan bahwa memang ada prosedur pelaksanaan audit yang dilanggar. Pusat Pembinaan Profesi Keuangan (PPPK) telah melakukan beberapa langkah untuk membuktikan dugaan pelanggaran standar audit yang dilaporkan oleh Forsa. Dari hasil analisis dan klarifikasi, bahwa akuntan publik tidak melaksanakan prosedur audit seperti konfirmasi kepada pihak eksternal, sehingga

terdapat indikasi pelanggaran terhadap standar audit sebagaimana diatur dalam Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP). Mengacu pada Undang-undang (UU) 5/2011 tentang Akuntan Publik dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 154/2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Akuntan Publik, ada beberapa sanksi yaitu pembatasan pemberian jasa tertentu, pembekuan izin selama 3 bulan.

<https://manado.tribunnews.com/amp/2019/04/09/kemkeu-sudah-mengendus-kejanggalan-audit-aisa>.

Fenomena kedua yaitu pada Februari, 2017. Dewan Pengawas Perusahaan Akuntan Publik (Public Company Accounting Oversight Board/PCAOB) Amerika Serikat mengumumkan telah menghukum Kantor Akuntan Publik (KAP) Purwantono, Suherman & Surja, berikut Partner Ernst and Young (EY) Indonesia karena terbukti berperan dalam kegagalan audit terhadap laporan keuangan satu perusahaan telekomunikasi di Indonesia pada 2011.

Dewan Pengawas Perusahaan Akuntan Publik AS/PCAOB pada Kamis, 9 Februari 2017 mengumumkan, Kantor Akuntan Publik Mitra Ernst & Young di Indonesia, yakni KAP Purwantono, Suherman & Surja membayar denda senilai US\$ 1 juta (sekitar Rp 13,3 miliar) kepada regulator Amerika Serikat, akibat divonis gagal melakukan audit laporan keuangan kliennya. Anggota jaringan EY di Indonesia yang mengumumkan hasil audit atas perusahaan telekomunikasi (ISAT) pada 2011 memberikan opini yang didasarkan atas bukti yang tidak memadai. Temuan itu berawal ketika Kantor Akuntan Mitra EY di AS melakukan kajian atas hasil audit kantor akuntan di Indonesia. Mereka menemukan bahwa hasil audit atas perusahaan telekomunikasi itu tidak didukung

dengan data yang akurat. EY Indonesia tetap memberikan opini wajar tanpa pengecualian terhadap laporan keuangan tersebut meski belum menyelesaikan hasil perhitungan dan analisisnya. Kasus EY terjadi dikarenakan salah satu bentuk perilaku penghentian prematur atas prosedur audit (bisnis.tempo.co, 11 Februari 2017).

Auditor yang bekerja di lapangan cenderung akan melakukan penghentian prematur atas prosedur audit jika tindakan supervisi oleh auditor senior/atasannya kurang ketat dalam melakukan monitoring terhadap aktivitas audit.

Peranan dari supervisi yang baik akan dapat meningkatkan kemungkinan terdeteksinya penghentian prematur atas prosedur audit sebagai salah satu bentuk penyimpangan perilaku audit (Rapina 2011 dalam sitorus, 2017).

Perilaku untuk menghentikan prosedur audit secara prematur kemungkinan banyak dilakukan dalam kondisi tekanan waktu (*time pressure*). Kondisi tekanan waktu (*time pressure*) adalah suatu kondisi dimana auditor mendapatkan tekanan dari tempatnya bekerja untuk dapat menyelesaikan tugasnya sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. Dalam bekerja auditor dihadapkan oleh adanya tekanan waktu. Tekanan waktu (*time pressure*) terdiri dari *time budget pressure* dan *time deadline pressure* (Biana, 2007).

Pada praktiknya, anggaran waktu digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi seorang auditor dalam melaksanakan pekerjaannya. Hal ini menimbulkan tekanan bagi auditor untuk menyelesaikan pekerjaannya sesuai dengan waktu yang dianggarkan. Batas waktu (*time deadline*) berhubungan dengan tekanan untuk menyelesaikan pekerjaan audit dengan tanggal tertentu.

Adanya batas waktu (*time deadline*) menyebabkan seseorang dituntut untuk menyelesaikan suatu pekerjaan dengan segera dan apabila hal tersebut tidak tercapai maka akan menimbulkan konflik karena waktu yang telah ditentukan untuk suatu pekerjaan audit terlewat serta kualitas dapat terganggu sehingga akan menimbulkan perilaku penghentian prematur atas prosedur audit.

Fenomena mengenai *time pressure* itu sendiri terjadi di Indonesia yaitu adanya keharusan dana kampanye partai politik peserta pemilu tahun 2017 diaudit oleh auditor independen. Auditor melaksanakan audit berdasarkan prosedur yang telah disepakati dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai klien KAP. Waktu yang diberikan bagi auditor untuk mengaudit laporan dana kampanye sangat pendek, yaitu 30 hari, sementara itu setiap partai memiliki banyak Duan Pimpinan Cabang (DPC) yang tersebar di daerah-daerah terpencil sehingga laporan yang harus diaudit sangat banyak. Hal ini menimbulkan tekanan terhadap auditor untuk menyelesaikan pekerjaannya sesuai dengan waktu yang dianggarkan. Dengan adanya tekanan tersebut menyebabkan auditor melakukan tindakan yang mengurangi kualitas audit seperti tidak melakukan sampling dan membuat pelaporan dana kampanye tidak valid (Elvan Dany, DetikNews: 2017)

Berdasarkan uraian permasalahan di atas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai masalah tersebut, dengan judul “**PENGARUH TINDAKAN SUPERVISIAUDITOR DAN *TIME PRESSURE* TERHADAP PENGHENTIAN PREMATUR ATAS PROSEDUR AUDIT** (Survey pada Auditor yang Bekerja di Kantor Akuntan Publik Kota Bandung yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK))”

## **1.2 Identifikasi Masalah Dan Rumusan Masalah**

### **1.2.1 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan fenomena yang telah diuraikan, maka penulis menyebutkan beberapa identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Masih banyak auditor yang diduga melakukan praktik penghentian prematur atas prosedur audit.
2. Masih terjadi kegagalan melakukan audit laporan keuangan klien, terhadap hasil audit atas perusahaan telekomunikasi tidak didukung dengan data yang akurat
3. Masih adanya *time pressure* yang menimbulkan tekanan terhadap auditor

### **1.2.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan di atas, maka penulis merumuskan masalah-masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana tindakan supervisi auditor pada Kantor Akuntan Publik di Kota Bandung
2. Bagaimana *time pressure* pada Kantor Publik di Kota Bandung
3. Bagaimana penghentian prematur atas prosedur audit pada Kantor Akuntan Publik di Kota Bandung
4. Seberapa besar pengaruh tindakan supervisi auditor terhadap penghentian prematur atas prosedur audit pada Kantor Akuntan Publik di Kota Bandung
5. Seberapa besar pengaruh *time presurre* terhadap penghentian prematur atas prosedur audit pada Kantor Akuntan Publik di Kots Bandung

6. Seberapa besar pengaruh tindakan supervisi dan *time pressure* terhadap penghentian prematur atas prosedur audit pada Kantor Akuntan Publik di Kota Bandung.

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, tujuan dari penelitian yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis tindakan supervisi pada Kantor Akuntan Publik di Kota Bandung
2. Untuk menganalisis *time pressure* pada Kantor Akuntan Publik di Kota Bandung Untuk menganalisis penghentian prematur atas prosedur audit pada Kantor Akuntan Publik di Kota Bandung
3. Untuk menganalisis besarnya pengaruh tindakan supervisi auditor terhadap penghentian prematur atas prosedur audit pada Kantor Akuntan Publik di Kota Bandung
4. Untuk menganalisis besarnya pengaruh *time pressure* terhadap penghentian prematur atas prosedur audit pada Kantor Akuntan Publik di Kota Bandung
5. Untuk menganalisis besarnya pengaruh supervisi auditor dan *time pressure* secara simultan terhadap penghentian prematur atas prosedur audit pada Kantor Akuntan Publik di Kota Bandung

## **1.4 Kegunaan Penelitian**

### **1.4.1 Kegunaan Praktis**

Penelitian ini diharapkan oleh penulis berguna bagi berbagai pihak, diantaranya :

#### 1. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan, untuk memperoleh gambaran mengenai masalah audit khususnya Tindakan Supervisi auditor dan *Time Pressure* terhadap Penghentian Prematur Atas Prosedur Audit

#### 2. Bagi Perusahaan/Instansi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan atau menjadi masukan dan tambahan informasi bagi pihak instansi untuk mengatasi kelemahan-kelemahan dalam hubungannya mengenai Tindakan supervisi auditor dan *Time Pressure* terhadap Penghentian Prematur Atas Prosedur Audit, sehingga kegiatan ini dapat dilaksanakan dengan baik dan dapat membantu dalam meningkatkan mutu pelaksanaan kinerja Kantor Akuntan Publik.

#### 3. Bagi Peneliti Lain

Dapat dijadikan sebagai bahan tambahan pertimbangan dan pemikiran dalam penelitian lebih lanjut dalam bidang audit yang sama, yaitu mengenai Tindakan Supervisi auditor dan *Time Pressure* terhadap Penghentian Prematur Atas Prosedur Audit.

#### **1.4.2 Kegunaan Teoritis**

Penulis berharap hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, wawasan serta informasi tentang Pengaruh Tindakan Supervisi auditor dan *Time Pressure* terhadap Penghentian Prematur Atas Prosedur Audit.

#### **1.5 Lokasi Dan Waktu Pelaksanaan**

Penulis akan melakukan penelitian pada Kantor Akuntan Publik di Kota Bandung. Waktu penelitian dilaksanakan pada bulan juli 2022 sampai dengan selesai menyesuaikan kesepakatan dengan instansi untuk mendapatkan data-data tertulis dan informasi lainnya sebagai bahan penyusunan skripsi.

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS**

#### **2.1 Kajian Pustaka**

##### **2.1.1 Ruang Lingkup *Auditing***

###### **2.1.1.1 Pengertian *Auditing***

*Auditing* merupakan suatu tindakan yang membandingkan antara keterangan atau keadaan yang sebenarnya (kondisi) menggunakan keadaan yg seharusnya terdapat (kriteria). pada dasarnya audit bertujuan buat menilai apakah pelaksanaan yang dilakukan telah sesuai dengan apa yg telah ditetapkan serta buat menilai atau melihat apakah yang ada telah sinkron dengan apa yang diharapkan.

Menurut Mulyadi (2014:9) audit artinya sebagai berikut:

“Audit adalah Suatu proses sistematis buat memperoleh serta mengevaluasi bukti secara objektif mengenai pernyataan-pernyataan wacana aktivitas serta insiden ekonomi, dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara pernyataan-pernyataan tersebut menggunakan kriteria yang telah ditetapkan, dan penyampaian akibat-hasilnya kepada pemakai yg berkepentingan”.

Menurut Messier, Clover serta Prawitt yang diterjemahkan oleh Linda Kusumaning Wedari (2014:12) dalam Dyana Esty (2020:15) pengertian *auditing* adalah:

“*Auditing* merupakan proses yang sistematis buat memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif mengenai asersi-asersi ihwal aktivitas serta insiden ekonomi untuk menentukan taraf kesesuaian antara asersi- asersi tersebut menggunakan kriteria yang ditetapkan dan mengkomunikasikan yang akan terjadi-hasilnya pada pihak-pihak yg berkepentingan”.

Menurut Soekrisno Agoes (2015:4) pengertian *auditing* adalah:

“*Auditing* ialah suatu pemeriksaan yang dilakukan secara kritis serta sistematis, oleh pihak yg independen, terhadap laporan keuangan yg telah disusun oleh manajemen, menggunakan tujuan buat dapat menyampaikan pendapat tentang kewajaran laporan keuangan tersebut”.

Menurut Hery (2016:10) dalam Dyana esty (2020:16) pengertian *auditing* adalah:

“Pengauditan (*auditing*) didefinisikan menjadi suatu proses yang sistematis buat memperoleh serta mengevaluasi (secara obyektif) bukti yg berhubungan menggunakan asersi tentang tindakan-tindakan dan peristiwa ekonomi, pada rangka menentukan taraf kepatuhan antara asersi dengan kriteria yang sudah ditetapkan, serta mengkomunikasikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan”.

Berdasarkan definisi tersebut dapat diinterpretasikan bahwa audit atau pemeriksaan wajib dilakukan oleh orang yg independen dan kompeten terhadap laporan keuangan yang tersaji kliennya atau manajemen buat mengumpulkan dan mengevaluasi bukti-bukti kesesuaiannya menggunakan kriteria yang sudah ditetapkan menggunakan tujuan memberikan pendapat mengenai kewajaran atas laporan keuangan.

### **2.1.1.2 Jenis-jenis *Auditing***

*Auditing* dapat dibagi dalam beberapa jenis yang dimaksudkan untuk menentukan tujuan atau sasaran yang ingin dicapai dengan adanya audit tersebut.

Menurut Soekrisno Agoes (2014:9), ditinjau dari jenis pemeriksaan maka jenis- jenis audit dapat dibedakan atas:

1. Audit Operasional (Management Audit), yaitu suatu pemeriksaan terhadap kegiatan operasi suatu perusahaan, termasuk kebijakan akuntansi dan kebijakan operasional yang telah ditetapkan oleh manajemen dengan maksud untuk mengetahui apakah kegiatan operasi telah dilakukan secara efektif, efisien dan ekonomis.
2. Pemeriksaan Ketaatan (Compliance Audit), yaitu suatu pemeriksaan yang dilakukan untuk mengetahui apakah perusahaan telah menaati peraturan-peraturan dan kebijakan-kebijakan yang berlaku, baik yang ditetapkan oleh pihak intern perusahaan maupun pihak ekstern perusahaan.
3. Pemeriksaan Internal (Intern Audit), yaitu pemeriksaan yang dilakukan oleh bagian internal audit perusahaan yang mencakup laporan keuangan dan catatan akuntansi perusahaan yang bersangkutan serta ketaatan terhadap kebijakan manajemen yang telah ditentukan.
4. Audit Komputer (Computer Audit), yaitu pemeriksaan yang dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) terhadap perusahaan yang melakukan proses data akuntansi dengan menggunakan system Electronic Data Processing (EDP).

Terdapat tiga jenis audit menurut Alvin A. Arens, Randal J. Elder, Mark S. Beasley yang dialih bahasakan oleh Amir Abadi Jusuf (2014:16) yaitu sebagai berikut:

1. Audit Operasional (*Operational Audit*)  
Audit operasional mengevaluasi efisiensi dan efektivitas setiap bagian dari prosedur dan metode operasi organisasi. Pada akhir audit operasional, manajemen biasanya mengharapkan saran-saran untuk memperbaiki operasi. Sebagai contoh, auditor mungkin mengevaluasi efisiensi dan akurasi pemrosesan transaksi penggajian dengan system computer yang baru dipasang. Mengevaluasi secara objektif apakah efisiensi dan efektifitas operasi sudah memenuhi kriteria yang ditetapkan jauh lebih sulit dari pada audit ketaatan dan audit keuangan. Selain itu, penetapan kriteria untuk mengevaluasi informasi dalam audit operasional juga bersifat sangat subjektif.
2. Audit Ketaatan (*Compliance Audit*)  
Audit ketaatan dilaksanakan untuk menentukan apakah pihak yang diaudit mengikuti prosedur, aturan, atau ketentuan yang ditetapkan oleh otoritas yang lebih tinggi. Hasil dari audit ketaatan biasanya dilaporkan kepada manajemen,

bukan kepada pengguna luar, karena manajemen adalah kelompok utama yang berkepentingan dengan tingkat ketaatan terhadap prosedur dan peraturan yang digariskan. Oleh karena itu, sebagian besar pekerjaan jenis ini sering kali dilakukan oleh auditor yang bekerja pada unit organisasi itu.

### 3. Audit Laporan Keuangan (*Financial Statement Audit*)

Audit atas laporan keuangan dilaksanakan untuk menentukan apakah seluruh laporan keuangan (informasi yang divertifikasi) telah dinyatakan sesuai dengan kriteria tertentu. Biasanya, kriteria yang berlaku adalah prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum (GAAP), walaupun auditor mungkin saja melakukan audit atas laporan keuangan yang disusun dengan menggunakan akuntansi dasar kas atau beberapa dasar lainnya yang cocok untuk organisasi tersebut. Dalam menentukan apakah laporan keuangan telah dinyatakan secara wajar sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku umum, auditor mengumpulkan bukti untuk menetapkan apakah laporan keuangan itu mengandung kesalahan yang vital atau saji lainnya.

#### **2.1.1.3 Tujuan *Auditing***

Perusahaan perlu memiliki suatu pengendalian intern untuk menjamin tercapainya tujuan yang telah direncanakan. Untuk dapat mencapai tujuan tersebut maka dalam pelaksanaan kegiatan harus diawasi dan sumber ekonomi yang dimiliki harus dikerahkan dan digunakan sebaik mungkin. Berdasarkan beberapa definisi audit yang telah dikemukakan di atas, dapat diketahui bahwa tujuan audit pada umumnya adalah menyatakan pendapat atas kewajaran, dalam semua hal yang material posisi keuangan dan hasil usaha serta arus kas sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Untuk mencapai tujuan ini auditor perlu menghimpun bukti kompeten yang cukup, serta mengidentifikasi dan menyusun sejumlah tujuan audit spesifik untuk setiap akun laporan keuangan. Dengan demikian tujuan audit menghendaki akuntan memberi pendapat mengenai kelayakan dari pelaporan

keuangan yang sesuai *standards auditing*.

Menurut Tuanakotta Theodorus M (2014:84) dalam Dyana esty (2020:19)

tujuan audit adalah:

“Tujuan Audit adalah mengangkat tingkat kepercayaan dari pemakai laporan keuangan yang dituju, terhadap laporan keuangan itu. Tujuan itu dicapai dengan pemberian opini oleh auditor mengenai apakah laporan keuangan disusun dalam segala hal yang material sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku.”

Menurut Arens dkk (2015:168) tujuan audit adalah:

“Tujuan audit adalah untuk menyediakan pemakai laporan keuangan suatu pendapat yang diberikan oleh auditor tentang apakah laporan keuangan disajikan secara wajar dalam semua hal yang material, sesuai dengan kerangka kerja akuntansi keuangan yang berlaku. Pendapat auditor ini menambah tingkat keyakinan pengguna yang bersangkutan terhadap laporan keuangan.”

Tujuan auditor menurut IAPI(2008) sebagai berikut:

- a. Untuk memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat terkait dengan kepatuhan terhadap ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang pada umumnya berdampak langsung dalam menentukan jumlah dan pengungkapan material dalam laporan keuangan
- b. Untuk melaksanakan prosedur audit tertentu untuk membantu mengungkapkan adanya ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan lain yang dapat berdampak materian terhadap laporan keuangan,
- c. Untuk merespon adanya ketidakpatuhan atau dugaan ketidakpatuhan peraturan perundang-undangan yang diidentifikasi selama pelaksanaan audit secara tepat

#### **2.1.1.4 Standar Auditing**

Untuk melakukan *auditing* diperlukan standar yang dapat menjadi acuan dalam audit. Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) adalah kodifikasi berbagai

pernyataan standar teknis yang merupakan panduan dalam memberikan jasa bagi Akuntan Publik di Indonesia, SPAP merupakan hasil pengembangan berkelanjutan standar profesional akuntan publik yang dimulai sejak 1973. SPAP dikeluarkan oleh dewan Standar Profesional Akuntan Publik Institut Akuntan Publik Indonesia (Rachmianty, 2015).

Standar auditing yang telah ditetapkan dan disahkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia dalam Sukrisno Agoes (2014:33) adalah sebagai berikut:

1. Standar Umum

Standar umum bersifat pribadi dan berkaitan dengan persyaratan auditor dan mutu pekerjaannya, dan berbeda dengan standar yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan lapangan dan pelaporan. Isi dari standar umum adalah sebagai berikut:

- a. Audit harus dilaksanakan oleh seseorang atau lebih yang memiliki keahlian dan pelatihan teknis yang cukup sebagai auditor
- b. Dalam semua hal yang berhubungan dengan penugasan, independen dalam sikap mental harus dipertahankan oleh auditor
- c. Dalam pelaksanaan audit dan penyusunan laporannya auditor wajib menggunakan kemahiran profesionalnya dengan seksama

2. Standar Pekerjaan Lapangan

Standar pekerjaan lapangan berkaitan dengan pelaksanaan pemeriksaan akuntan di lapangan (*audit field work*), mulai dari perencanaan audit dan supervisi, pemahaman dan evaluasi pengendalian intern, pengumuman bukti-bukti audit compliance test, substantive test, analytical *review*, sampai selesai audit *field work*.

- a. Pekerjaan harus direncanakan sebaik-baiknya dan jika digunakan asisten harus disupervisi dengan semestinya
- b. Pemahaman yang memadai atas struktur pengendalian intern harus diperoleh untuk merencanakan audit dan menentukan sifat, saat dan lingkup pengujian yang akan dilakukan
- c. Bukti audit kompeten yang cukup harus diperoleh melalui inspeksi, pengamatan pengajuan pertanyaan dan konfirmasi sebagai dasar yang memadai untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan

### 3. Standar pelaporan

Standar pelaporan merupakan pedoman bagi auditor independen dalam menyusun laporan auditnya.

- a. Laporan audit harus menyatakan apakah laporan keuangan telah disusun sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum
- b. Laporan audit harus menunjukkan keadaan yang didalamnya prinsip akuntansi tidak secara konsisten diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan periode berjalan dalam hubungannya dengan prinsip akuntansi yang diterapkandalam periode sebelumnya
- c. Pengungkapan informative dalam laporan keuangan harus dipandang memadai, kecuali dinyatakan lain dalam laporan audit
- d. Laporan audit harus memuat sesuatu pernyataan pendapat mengenai laporan keuangan secara keseluruhan atau suatu asersi bahwa pernyataan demikian tidak dapat diberikan, maka alasannya harus dinyatakan. Dalam semua hal yang sama nama auditor dikaitkan dengan laporan keuangan, laporan audit harus memuat petunjuk yang jelas mengenai sifat pekerjaan auditor, jika ada dan tingkat tanggung yang dipikulnya

Standar ini mengatur auditor untuk menyatakan apakah laporan keuangan yang diperiksa sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum atau pernyataan mengenai ketidak konsistenan penerapan prinsip akuntansi yang berlaku umum, pengungkapan informatif dalam laporan keuangan, dan pernyataan pendapat atas laporan keuangan secara keseluruhan.

#### **2.1.1.5 Pengertian dan Jenis-jenis Auditor**

Auditor merupakan salah satu profesi dalam bidang akuntansi yang memiliki kualifikasi tertentu dalam melakukan audit atas laporan keuangan dan kegiatan suatu perusahaan atau organisasi dan juga suatu aktivitas audit dilakukan oleh seorang auditor untuk menemukan suatu ketidakwajaran terkait dengan informasi yang

disajikan.

Menurut Mulyadi (2008:1) auditor adalah:

“Auditor adalah akuntan publik yang memberikan jasa audit kepada auditee untuk memeriksa laporan keuangan agar bebas dari salah saji”.

Menurut Arens, Elder, dan Beasley (2008:4) auditor adalah:

“Auditor adalah yang melakukan pengumpulan dan evaluasi bukti tentang informasi untuk menentukan dan melaporkan kesesuaian antara informasi dan kriteria yang telah ditetapkan. Auditing harus dilakukan oleh orang yang kompeten dan independen”.

Dari beberapa pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa auditor merupakan orang yang sangat memegang peranan penting dalam aktivitas audit dan memiliki kemampuan dalam melaksanakan audit sesuai dengan standar profesionalnya.

Menurut Arens, Beasley, dan Elder yang diterjemahkan oleh Herman Wibowo(2011:19-21) jenis-jenis auditor yaitu:

1. Kantor Akuntan Publik

Kantor akuntan publik bertanggungjawab mengaudit laporan keuangan historis yang dipublikasikan oleh semua perusahaan terbuka, kebanyakan perusahaan lain yang cukup besar dan banyak perusahaan serta organisasi non komersial yang lebih kecil. Kantor akuntan publik biasa disebut auditor eksternal atau auditor independen untuk membedakannya dengan auditor internal.

2. Auditor Internal Pemerintah

Auditor internal pemerintah adalah auditor yang bekerja untuk Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), guna melayani pemerintah. Porsi utama upaya audit BPKP adalah dikerahkan untuk mengevaluasi efektifitas dan efisiensi operasional berbagai program pemerintah.

3. Auditor Badan Pemeriksa Keuangan

Auditor padan pemeriksa keuangan adalah auditor yang bekerja untuk Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia, badan yang didirikan berdasarkan konstitusi Indonesia. Dipimpin oleh seorang kepala, BPK melapor dan bertanggungjawab sepenuhnya kepada DPR.

#### 4. Auditor Pajak

Direktorat Jenderal (Ditjen) pajak bertanggungjawab untuk memberlakukan peraturan pajak. Salah satu tanggung jawab utama ditjen pajak adalah mengaudit SPT wajib pajak untuk menentukan apakah SPT itu sudah mematuhi peraturan pajak yang berlaku. Audit ini murni bersifat audit ketaatan. Auditor yang melakukan pemeriksaan disebut auditor pajak.

#### 5. Auditor Internal

Auditor internal dipekerjakan oleh perusahaan untuk melakukan audit bagi manajemen, sama seperti BPK mengaudit DPR. Tanggungjawab auditor internal sangat beragam, tergantung pada yang mempekerjakan mereka.

Menurut Sukrisno Agoes dan Jan Hoesada (2012:54) jenis-jenis auditor dibagi menjadi 7 macam, yaitu:

##### 1. Akuntan Publik (*Public Accounting Firm*)

Akuntan publik adalah akuntan yang telah memperoleh izin dari menteri keuangan untuk memberikan jasa sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 17/PMK.01/2008 tentang Jasa Akuntan Publik.

##### 2. Auditor Intern (Internal Auditor)

Auditor yang bekerja dalam perusahaan yang tugas pokoknya menentukan apakah kebijakan dan prosedur yang ditetapkan oleh manajemen telah dipatuhi, menentukan efektivitas dan efisiensi prosedur kegiatan organisasi, serta menentukan keandalan informasi yang dihasilkan berbagai organisasi.

##### 3. Operational Audit (Manajemen Auditor)

Manajemen audit disebut juga operational audit, functional audit, systems audit yang merupakan pemeriksaan terhadap kegiatan operasi suatu perusahaan, termasuk kebijakan akuntansi dan kebijakan operasional yang telah ditentukan oleh manajemen untuk mengetahui apakah kegiatan operasi tersebut sudah dilakukan secara efektif, efisien dan ekonomis. Manajemen audit bertujuan menghasilkan perbaikan dalam pengelolaan aktivitas objek yang diterima dengan membuat rekomendasi tentang cara- cara pelaksanaan yang lebih baik dan efisien.

4. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

Badan pemeriksaan keuangan adalah lembaga tinggi negara dalam system ketatanegaraan Indonesia yang memiliki wewenang memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara. Menurut UUD 1945, BPK merupakan lembaga bebas dan mandiri. Anggota BPK dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan diresmikan oleh Presiden. Nilai- nilai dasar yang dipegang teguh oleh BPK RI adalah sebagai berikut:

- a. Independensi
- b. Integritas
- c. Profesionalisme

5. Badan Pemeriksaan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)

Badan Pemeriksaan Keuangan dan Pembangunan atau yang disingkat BPKP adalah lembaga pemerintah non-departemen Indonesia yang bertugas melaksanakan tugas pemerintahan dibidang pengawasan keuangan dan pembangunan.

6. Inspektorat Jenderal (Itjen) di Departemen

Dalam Kementerian Negara Republik Indonesia, Inspektorat Jenderal (Itjen) adalah unsur pembantu yang ada disetiap departemen/kementerian yang bertugas melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas di lingkungan departemen kementriannya.

7. Badan Pengawasan Daerah (Bawasda)

Badan pengawas daerah adalah sebuah badan/lembaga fungsional yang ada dalam lingkungan pemerintah daerah di Indonesia baik pada tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan dibidang pengawasan dan bersifat mandiri. Badan pengawas daerah dibentuk untuk melakukan pengawasan penggunaan anggaran pemerintah daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam rangka mendukung peningkatan kinerja instansi pemerintah daerah.

Menurut Abdul Halim (2015:11-12) dalam Dyana esty (2020:23) jenis-jenis auditor dibagi menjadi 3 (tiga) kelompok, diantaranya ialah:

1. Auditor Internal

Auditor internal merupakan karyawan suatu perusahaan tempat mereka melakukan audit. Tujuan audit internal adalah untuk membantu manajemen dalam melaksanakan tanggung jawabnya secara efektif. Auditor internal

terutama berhubungan dengan auditor operasional dan audit kepatuhan. Meskipun demikian, pekerjaan auditor internal dapat mendukung audit atas laporan keuangan yang dilakukan auditor independen.

## 2. Auditor Pemerintah

Auditor pemerintah adalah auditor yang bekerja di instansi pemerintah yang tugas utamanya adalah melakukan audit atas pertanggungjawaban keuangan dari berbagai organisasi dalam pemerintah. Audit ini dilaksanakan oleh auditor pemerintah yang bekerja di BPKP dan BPK. Disamping itu, ada auditor pemerintah yang bekerja di Direktorat Jenderal Pajak. Tugas auditor perpajakan ini adalah memeriksa pertanggungjawaban keuangan para wajib pajak baik perseorangan maupun yang berbentuk organisasi kepada pemerintah.

## 3. Auditor Independen

Auditor independen adalah para praktisi individual atau anggota kantor akuntan publik yang memberikan jasa audit kepada klien. Klien tersebut merupakan perusahaan bisnis yang berorientasi laba, organisasi nirlaba, badan-badan pemerintahan, maupun individu perseorangan. Auditor harus independen terhadap klien pada saat melaksanakan audit maupun saat pelaporan hasil audit. Audit independen menjalankan pekerjaannya di bawah suatu kantor akuntan publik.

## **2.1.2 Tindakan Supervisi dalam Audit**

### **2.1.2.1 Pengertian Supervisi dan Supervisor**

Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dalam SA Seksi 311, PSA No.05 mendefinisikan supervisi mencakup pengarahan terhadap asisten dalam mencapai tujuan audit dan penentuan apakah tujuan tersebut tercapai.

Menurut Soekrisno (2012:143) tindakan supervisi adalah:

“Tindakan supervisi adalah pengarahan kepada asisten yang terkait dalam pencapaian tujuan dan menentukan apakah tujuan tersebut tercapai. Unsur- unsur supervisi mencakup tentang pemberian instruksi kepada asisten, tetap menjaga penyampaian informasi masalah penting yang ditemukan dalam audit, me-review pekerjaan yang dilaksanakan mengenai apakah hasilnya sejalan dengan kesimpulan yang disajikan dalam laporan audit, menyelesaikan perbedaan pendapat antara staf audit dan KAP.”

Dalam PSA No.5 Tahun 2001 (SA Seksi 311: 311.1):

“Pekerja harus direncanakan sebaik-baiknya dan jika digunakan asisten harus disupervisi dengan semestinya. Unsur supervisi adalah memberikan instruksi kepada asisten, tetap menjaga penyampaian informasi masalah-masalah penting yang dijumpai dalam audit, me-review pekerjaan yang dilaksanakan, dan menyelesaikan perbedaan pendapat diantara para staf auditor.”

Program kerja yang akan dilaksanakan direncanakan dengan matang dan pelaksanaannya oleh para asisten diawasi secara seksama. Kegiatan supervisi bukan mencari-cari kesalahan, tetapi lebih banyak mengandung unsur pembinaan, agar kondisi pekerjaan yang sedang disupervisi dapat diketahui kekurangannya (bukan semata-mata kesalahannya) untuk dapat dikomunikasikan bagian yang perlu diperbaiki. Hal ini tercantum dalam standar auditing pekerjaan lapangan butir a. Pekerjaan harus direncanakan sebaik-baiknya dan jika digunakan asisten harus disupervisi dengan semestinya. Jadi proses supervisi pada KAP merupakan

jawaban atas standar audit pekerjaan lapangan.

Pengawasan atau supervisi merupakan unsur yang sangat penting dalam audit karena cukup banyak bagian pekerjaan yang dilaksanakan oleh staf yang belum berpengalaman. (Arens et. al., 2008:43).

Secara umum yang dimaksud dengan supervisi adalah melakukan suatu tindakan pengamatan secara langsung dan berkala oleh atasan terhadap pekerjaan yang dilakukan oleh bawahan untuk kemudian apabila ditemukan masalah, segera diberikan petunjuk atau bantuan yang bersifat langsung guna mengatasinya.

Dari pengertian tersebut dapat diartikan bahwa supervisi merupakan kegiatan pengawasan, pengontrolan atau pengendalian yang dilaksanakan oleh seorang yang disebut Supervisor. Pengertian supervisi tidak dapat dilepaskan dengan pengertian serta peran penting seorang supervisor. Oleh karena itu, pemahaman atas fungsi dan peran penting seorang supervisor akan memberikan pemahaman yang jelas atas makna dari supervisi.

#### **2.1.2.2 Manfaat dan Tujuan Supervisi**

Tujuan supervisi dapat memberikan bantuan secara langsung kepada pegawai sehingga pegawai dapat melaksanakan tugas atau pekerjaannya dengan hasil yang baik. Apabila supervisi dapat dilakukan dengan baik, akan diperoleh banyak manfaat, di antaranya adalah sebagai berikut (Azwar,2010, Suarli & Bachtiar, 2010) dalam Nikita (2015:7) :

- Dapat lebih meningkatkan efektifitas kerja, peningkatan ini erat kaitannya dengan peningkatan pengetahuan dan keterampilan bawahan, serta makin terbinanya hubungan dan suasana kerja yang lebih harmonis antara atasan

dan bawahan.

- Dapat lebih meningkatkan efisiensi kerja, peningkatan ini erat kaitannya dengan makin berkurangnya kesalahan yang dilakukan bawahan, sehingga pemakaian sumber daya (tenaga, harta, dan sarana) yang sia-sia akan dapat dicegah.

Apabila kedua peningkatan ini dapat diwujudkan, sama artinya dengan telah tercapainya tujuan suatu organisasi. Menurut Suarli & Bacthtiar (2009) dalam Dyana esty (2020:25) tujuan supervisi seabagai berikut:

“Tujuan pokok dari supervisi adalah menjamin pelaksanaan berbagai kegiatan yang telah direncanakan secara benar dan tepat, dalam arti lebih efektif dan efisien, sehingga tujuan yang telah ditetapkan organisasi dapat dicapai dengan memuaskan”

Menurut Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (2008:10) tujuan tindakan supervisi dalam pelaksanaan audit adalah:

1. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian atas penugasan audit yang dilakukan oleh tim audit.  
Supervisi audit merupakan aktivitas manajerial yang bertujuan untuk melakukan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan penugasan audit yang dilakukan oleh tim audit agar audit dapat terlaksana secara ekonomis dan efisien serta mencapai tujuan audit yang telah ditetapkan yaitu memberikan rekomendasi perbaikan kinerja,
2. Melaksanakan pengendalian serta penjaminan atas kualitas atau mutu hasil audit (*quality control and quality assurance*)  
Supervisi audit merupakan kewajiban pemenuhan salah satu standar audit yang berlaku, seperti Standar Audit Aparat Pengawasan Fungsional Pemerintah (SA-APFP) atau Standar pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN). Dengan dipenuhinya standar profesi auditor, hal ini berarti penugasan audit memenuhi ukuran minimal kualitas atau mutu proses audit dan hasilnya berupa laporan hasil audit dapat dijamin kualitas atau mutunya serta dapat dipertanggung jawabkan secara profesional.

### **2.1.2.3 Pelaksanaan Supervisi**

Dalam pelaksanaan supervisi terhadap karyawan, supervisor terlibat dalam setiap kegiatan manajemen seperti yang dikemukakan oleh Agus Dharma (2001:5) dalam Dyana esty (2020:26) adalah sebagai berikut:

1. Perencanaan  
Yaitu menetapkan tujuan, memutuskan cara pencapaian tujuan, menetapkan cara tindakan, serta menetapkan kebijakan dan prosedur.
2. Pengorganisasian  
Yaitu menetapkan pembagian kerja, penugasan kerja, pengelompokan kerja untuk koordinasi serta menetapkan wewenang dan tanggung jawab.
3. Pendayagunaan Tenaga  
Yaitu penyeleksian orang untuk melaksanakan pekerjaan serta melatih dan menilai kinerja karyawan.
4. Pembinaan  
Yaitu memberikan contoh, memotivasi dan pemberdayaan karyawan. Termasuk disini adalah upaya untuk menciptakan lingkungan kerja yang kondusif bagi karyawan untuk berkinerja bagus.
5. Pengendalian  
Yaitu penghimpunan informasi tentang pencapaian hasil, membandingkannya dengan rencana, standard melakukan tindakan perbaikan jika perlu.

### **2.1.2.4 Prinsip-prinsip Pokok dalam Supervisi**

Kegiatan supervisi mengusahakan seoptimal mungkin kondisi kerja yang kondusif dan nyaman yang mencakup lingkungan fisik, atmosfer kerja, dan jumlah sumber yang dibutuhkan untuk memudahkan pelaksanaan tugas. Untuk itu diperlukan beberapa prinsip pokok pelaksanaan supervisi. Menurut Suarli dan Bahtiar (2009) Dyana esty (2020:26) prinsip-prinsip pokok dalam supervisi adalah sebagai berikut:

1. Tujuan utama supervisi adalah untuk lebih meningkatkan kinerja bawahan, bukan untuk mencari kesalahan. Peningkatan kinerja ini dilakukan dengan melakukan pengamatan langsung terhadap pekerjaan

bawahan, kemudian apabila ditemukan masalah, segera diberikan petunjuk atau bantuan untuk mengatasinya.

2. Sejalan dengan tujuan utama yang ingin dicapai, sifat supervisi harus edukatif dan suportif, bukan otoriter.
3. Supervisi harus dilakukan secara teratur atau berkala. Supervisi yang hanya dilakukan sekali bukan supervisi yang baik.
4. Supervisi harus dapat dilaksanakan sedemikian rupa sehingga terjalin kerja sama yang baik antara atasan dan bawahan, terutama pada saat proses penyelesaian masalah, dan untuk lebih mengutamakan kepentingan bawahan.
5. Strategi dan tata cara supervisi yang akan dilakukan harus sesuai dengan kebutuhan masing-masing bawahan secara individu. Penerapan strategi dan tata cara yang sama untuk semua kategori bawahan, bukan merupakan supervisi yang baik.
6. Supervisi harus dilaksanakan secara fleksibel dan selalu disesuaikan dengan perkembangan.

#### **2.1.2.4 Tindakan Supervisi dalam Audit**

Menurut SPAP (SPM Seksi 100, PSPM No.01) :

“Supervisi adalah tindakan yang memberikan keyakinan memadai bahwa pelaksanaan perikatan memenuhi standar mutu yang diterapkan. Lingkup supervisi dan review yang sesuai pada suatu kondisi tertentu, tergantung atas beberapa faktor, antara lain kerumitan masalah, kualifikasi staf pelaksana perikatan dan lingkup konsultasi yang tersedia dan yang digunakan. Tanggung jawab kantor akuntan publik untuk menetapkan prosedur mengenai supervisi dengan tanggung jawab staf secara individual untuk merencanakan dan melakukan supervisi secara memadai dan perikatan tertentu”.

Menurut Ignasia Niken (2005:25) dalam Dyana esty (2020:27) tindakan supervisi dalam audit merupakan:

“Supervisi adalah tindakan yang dilakukan oleh atasan kepada bawahan yang mengarahkan dalam pencapaian tujuan dan menentukan apakah tujuan tersebut telah tercapai”.

AECC (*Accountant Education Change Commission*) Issue Statement No. 4

mendefinisikan tindakan supervisi sebagai berikut:

“Tindakan supervisi adalah pengarahan kepada asisten dalam mencapai tujuan audit dan penentuan apakah tujuan tersebut tercapai.”

Dalam bidang pemeriksaan akuntan, supervisi diatur dalam *Statement on Auditing Standard (SAS)* Nomor 22 tentang standar pekerjaan lapangan yang menyatakan bahwa:

“Pekerjaan harus direncanakan dengan sebaik-baiknya dan jika menggunakan asisten, harus disupervisi dengan semestinya”.

Berdasarkan definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa tindakan supervisi dalam audit merupakan tindakan pengawasan dan pengontrolan yang dilakukan oleh atasan dalam hal ini auditor senior kepada bawahan (auditor pemula) yang bertujuan untuk melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap kualitas tugas yang telah ditentukan.

Melakukan tugas dengan baik dibutuhkan keterampilan bukan hanya keterampilan teknis melainkan juga keterampilan dalam supervisi. Dengan adanya tindakan supervisi akan memberikan inspirasi kepada bawahan untuk bersama-sama menyelesaikan tugas atau pekerjaan dengan jumlah yang lebih banyak, waktu yang lebih cepat, cara yang lebih mudah dan hasil yang lebih baik dari pada jika dikerjakan sendiri. Demikian pula dengan seseorang manajer atau supervisor, ia harus bisa membawa timnya ke target yang telah ditetapkan.

Auditor senior diharuskan memberikan instruksi kepada asisten, tetap menjaga penyampaian informasi masalah-masalah penting yang dijumpai dalam

audit, *me-review* pekerjaan yang dilaksanakan dan menyelesaikan perbedaan pendapat diantara staf auditor akuntan. Hal-hal yang kemungkinan berpengaruh terhadap sifat, lingkup dan prosedur yang harus dilaksanakan.

Pekerjaan yang dilaksanakan oleh asisten harus direview untuk menentukan apakah pekerjaan tersebut telah dilaksanakan secara memadai dan auditor harus menilai apakah hasilnya sejalan dengan kesimpulan yang disajikan dalam laporan keuangan.

#### **2.1.2.6 Aspek-aspek Utama Supervisi dalam Audit**

Di Amerika Serikat AECC (*Accountant Education Change Commision*) menerbitkan *Issue Statement* No. 4 salah satu pembahasannya adalah AECC, *Recommendation for Supervisor of Early Experience*. Isi dari AECC adalah rekomendasi AECC kepada supervisor or untuk melakukan supervisi terhadap akuntan pemula, dengan tepat khususnya dalam tiga aspek utama tindakan supervisi sebagaimana yang disarankan oleh AECC, sebagai berikut:

1. Supervisor hendaknya menunjukkan sikap kepemimpinan atau mentoring yang kuat. Kepemimpinan adalah kemampuan mempengaruhi suatu kelompok ke arah pencapaian tujuan. Seorang supervisor harus berorientasi pada pekerjaannya dan memiliki sensitivitas sosial yang memberikan feedback, penghargaan, pengakuan keahlian terhadap stafnya. Mentoring didefinisikan sebagai proses membentuk dan mempertahankan hubungan secara intensif antara karyawan senior dengan karyawan junior dan supervisi sebagai penghubungnya. Rincian aktivitas yang disarankan oleh AECC adalah :
  - Supervisor sering memberikan feedback yang jujur, terbuka, dan interaktif kepada junior di bawah supervisinya.
  - Supervisor memperhatikan keluhan atau masalah yang dihadapi junior auditor, secara langsung supervisor menanyakan keadaan dan penyebabnya.
  - Supervisor meningkatkan konseling dan mentoring, misalnya memberikan pujian terhadap yang baik, memperlakukan junior auditor

sebagai professional, membantu junior auditor untuk menentukan peluang kerja dan memperdulikan minat serta rencana junior auditor.

- Supervisor dituntut mampu menjadi panutan sebagai profesional di bidangnya, mampu menumbuhkan kebanggaan akan profesi yang di gelutinya.
2. Supervisor hendaknya menciptakan kondisi kerja yang mendorong terjadinya kesuksesan. Kondisi kerja merupakan kesempatan yang individu rasakan untuk melakukan tugas yang bernilai. Seringkali auditor mengeluh karena tidak memahami gambaran secara keseluruhan dari penugasan, sehingga supervisi harus meningkatkan mental para bawahannya untuk bekerja dengan benar pada saat pertama dan menciptakan kondisi yang memungkinkan hal itu terjadi. Rincian aktivitas yang disarankan AECC adalah :
- Menumbuhkan sikap mental pada junior auditor untuk bekerja dengan benar sejak awal dan menciptakan kondisi yang memungkinkan hal itu terjadi. Hal itu bisa dilaksanakan dengan menjelaskan suatu penugasan kepada junior auditor secara gamblang, mengalokasikan waktu yang cukup dalam penugasan yang rumit sehingga bisa terselesaikan dengan baik, menampung semua keluhan akan hambatan yang dihadapi termasuk diantaranya hambatan budgeter dan menjelaskan bagaimana suatu bagian penugasan sesuai dengan penugasan keseluruhan serta senantiasa mengawasi junior auditor sampai penugasan selesai.
  - Mendistribusikan tugas dan beban secara adil dan sesuai dengan tingkat kemampuan junior auditor.
  - Meminimalkan stress yang berkaitan dengan pekerjaan.
3. Supervisor hendaknya memberikan tugas yang menantang dan mempercepat terselesaikannya tugas. Rincian aktivitas yang disarankan: Penugasan merupakan kesempatan yang dimiliki oleh individu untuk memilih tugas yang berarti bagi auditor. Rincian aktivitas yang disarankan AECC adalah:
- Supervisor mendelegasikan tanggung jawab sesuai dengan kemampuan dan kesiapan junior auditor.
  - Memaksimalkan kesiapan junior auditor untuk menggunakan kemampuan verbal baik lisan maupun tulisan, berpikiran kritis dan menggunakan teknik analitis serta membantu junior auditor untuk meningkatkan kemampuan tersebut.

### **2.1.3 Time Pressure**

#### **2.1.3.1 Pengertian Time Pressure**

Menurut (DeZoort, 1998) dalam Rio Monoarfa (2018:13) pengertian tekanan waktu (*time pressure*) adalah sebagai berikut :

“Tekanan waktu (*time pressure*) adalah suatu kondisi dimana auditor mendapatkan tekanan dari tempanya bekerja untuk dapat menyelesaikan tugasnya sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. Auditor dituntut untuk melakukan efisiensi biaya dan waktu dalam melaksanakan audit.”

Menurut Sulastiningsih dan Candra (2016:43) pengertian Tekanan waktu (*Time Pressure*) adalah:

“Tekanan waktu (*time Pressure*) adalah suatu kondisi dimana auditor mendapatkan tekanan dari tempatnya bekerja untuk dapat menyelesaikan tugasnya sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan”.

Menurut Rosdiana (2017:121) pengertian *Time pressure* sebagai berikut :

“Kondisi *Time Pressure* yang dialami auditor merupakan kondisi dimana auditor mendapatkan tekanan dari Kantor Akuntan Publik (KAP) tempat mereka bekerja untuk menyelesaikan pekerjaan audit pada waktu dan anggaran biaya yang telah ditetapkan sebelumnya. Setiap Kantor Akuntan Publik selalu membuat anggaran waktu dalam melakukan penugasan audit, hal tersebut menyebabkan auditor bekerja dalam keterbatasan waktu”.

Menurut Wahyudi, et al, (2011:58) pengertian *time pressure* adalah:

“*Time pressure* adalah Merupakan suatu keadaan dimana auditor mendapatkan tekanan dari Kantor Akuntan Publik tempatnya bekerja, untuk menyelesaikan audit pada waktu dan anggaran biaya yang telah ditentukan sebelumnya serta akan berdampak negative terhadap kinerja auditor”.

Berdasarkan teori di atas penulis dapat menginterpretasikan bahwa *Time Pressure* merupakan kendala yang dialami oleh auditor dalam melaksanakan pemeriksaan yang disebabkan oleh adanya keterbatasan waktu yang dialokasikan dalam penugasan.

#### **2.1.3.2 Jenis jenis *Time Pressure***

Menurut (Kelly & Margheim, 1990) dalam Herningsih (2002:113) mengemukakan bahwa *time pressure* dibagi menjadi dua yaitu:

1. *Time budget pressure*

Yaitu keadaan dimana auditor dituntut untuk melakukan efisiensi terhadap anggaran waktu yang telah disusun, atau terdapat pembatasan waktu dalam anggaran yang sangat ketat.

2. *Time deadline pressure*

Yaitu kondisi dimana auditor dituntut untuk menyelesaikan tugas audit tepat pada waktunya.

Berdasarkan teori di atas penulis mendapat pemahaman bahwa *time pressure* digunakan untuk mengurangi biaya dalam pelaksanaan audit. Adanya *time budget* membuat auditor harus menyelesaikan tugas secepatnya sesuai dengan anggaran waktu yang telah ditetapkan.

#### **2.1.3.3 Tujuan *Time pressure***

Menurut Herningsih (2002:113) tujuan *time pressure* sebagai berikut:

“*Time pressure* yang diberikan oleh KAP kepada auditornya bertujuan untuk mengurangi biaya audit. Semakin cepatwaktu pengerjaan audit, maka

biaya pelaksanaan audit akan semakin kecil.”

Utary (2016:87) menyatakan mengenai tujuan *time pressure* adalah sebagai berikut:

*“time had given by the firm to the auditor to reduce audit fee. The faster processing time of audit, the audit fee will be smaller. Time pressure is defined as “constraints that occur in the audit contract because of limited resources such as time allocated to carry out the entire task of Auditing”*

“Anggaran waktu yang diberikan perusahaan kepada auditor untuk mengurangi biaya audit. Semakin cepat waktu proses audit maka biaya audit akan semakin kecil. Tekanan anggaran waktu diartikan sebagai “kendala yang terjadi pada kontrak audit karena keterbatasan sumber daya seperti waktu yang dialokasikan untuk melaksanakan seluruh tugas audit”.

Berdasarkan teori di atas dapat diinterpretasikan oleh penulis bahwa tujuan dari adanya tekanan waktu adalah untuk mengurangi biaya audit dan penugasan dapat diselesaikan sesuai dengan batas waktu yang telah dianggarkan.

#### **2.1.3.4 Dampak *Time Pressure***

Dezoort (1998) dalam Ratih (2013:95) mengelompokkan dampak tekanan waktu sebagai berikut:

4. *impacting Attitudes* (Mempengaruhi Sikap)
  - Stres
  - Munculnya perasaan kegagalan
  - Ketidakpuasan dalam melakukan pekerjaan
  - Terjadi kesalahan yang tidak diinginkan
5. *Impacting Intention* (Mempengaruhi Tujuan)
  - Menerbitkan laporan dibawah tenggat waktu
  - Menerima bukti yang lemah selama proses audit
6. *Impacting Behavior* (Mempengaruhi Perilaku)
  - Menghilangkan beberapa prosedur audit yang harus dilakukan
  - Lalai dalam menerapkan standar akuntansi

Berdasarkan hal tersebut penulis mendapat pemahaman bahwa *time pressure* memiliki dampak terhadap individu itu sendiri seperti mengalami stress dalam pekerjaan, tidak melakukan penugasan sesuai dengan prosedur yang ada, maupun dapat mempengaruhi niat individu itu sendiri.

### **2.1.3.5 Indikator *Time Pressure***

Menurut Menurut Dezoort (1998) dalam Herningsih (2001:45) pengukuran *time pressure* adalah sebagai berikut :

#### a Tingkat Pengetatan Anggaran

- Efisiensi terhadap anggaran waktu

Efisiensi terhadap anggaran waktu yaitu auditor bertindak dengan cara meminimalisir kerugian atau pemborosan waktu dalam melaksanakan audit.

- Pembatasan waktu yang ketat dalam anggaran

Pembatasan waktu yang ketat dalam anggaran yaitu auditor ketika membuat anggaran waktu dengan klien harus memikirkan batasan waktu dalam penyelesaian audit sehingga KAP memperoleh hasil yang terbaik.

#### b Tingkat Ketercapaian Anggaran

- Menyelesaikan audit tepat waktu

Menyelesaikan audit tepat waktu yaitu auditor melaporkan hasil audit sesuai dengan anggaran waktu yang direncanakan. Sehingga memaksa auditor untuk menyelesaikan audit tepat pada waktunya.

- Tingkat pemenuhan pencapaian *time pressure* auditor

Tingkat pemenuhan pencapaian *time pressure* auditor yaitu seberapa besar dan seberapa banyak auditor memenuhi pencapaian *time pressure* dalam melakukan audit.

## **2.4.2 Penghentian Prematur atas Prosedur Audit**

### **2.1.4.1 Pengertian Prosedur Audit**

Menurut Sukrisno Agoes (2016:147) audit prosedur adalah:

“Langkah-langkah yang harus dijalankan auditor dalam melaksanakan pemeriksaan dan sangat diperlukan agar tidak melakukan penyimpangan dan dapat bekerja secara efektif dan efisien”.

Menurut Arens et al. (2011:157) prosedur audit adalah:

“Rincian instruksi untuk pengumpulan jenis bukti audit yang diperoleh pada waktu tertentu saat berlangsungnya proses audit”.

Menurut Mulyadi (2014:14) prosedur audit antara lain:

“Prosedur audit yang disebutkan dalam standar meliputi inspeksi, pengamatan, permintaan keterangan, konfirmasi, penelusuran, pemeriksaan bukti pendukung, perhitungan, scanning, pelaksanaan ulang, dan teknik audit berbantuan komputer”.

Menurut IAI (2001:150.1):

“Dalam melaksanakan tugasnya, auditor harus memperoleh bukti-bukti audit yang kompeten serta cukup melalui proses inspeksi, pengamatan, permintaan keterangan dan konfirmasi sebagai dasar memadai untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan”.

Berdasarkan definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa prosedur audit merupakan langkah-langkah yang digunakan oleh auditor untuk mengumpulkan dan mengevaluasi bahan bukti yang mencukupi dan kompeten.

#### **2.1.4.2 Prosedur Audit yang Ditetapkan dalam Standar Profesi Akuntan Publik**

Standar auditing (SPAP, 2011) mengatur bahwa auditor dalam melaksanakan tugasnya harus mendapatkan bukti audit kompeten yang cukup melalui inspeksi pengamatan, permintaan keterangan, dan konfirmasi sebagai dasar memadai untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan.

Prosedur audit yang digunakan dalam penelitian ini ialah prosedur audit yang dilaksanakan pada tahap perencanaan audit dan tahap pekerjaan lapangan yang telah ditetapkan dalam Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) yang mudah untuk dilakukan praktik penghentian prematur atas prosedur audit. Prosedur audit tersebut yang dilaksanakan pada tahap perencanaan dan tahap pekerjaan lapangan tersebut mudah untuk dilakukan praktik penghentian prematur, antara lain:

a. Pemahaman bisnis dan industri klien

Auditor harus memperoleh pengetahuan dan pemahaman bisnis klien yang cukup tentang industri dan hak kepemilikan, manajemen dan operasi entitas yang akan diaudit untuk memungkinkan auditor mengidentifikasi dan memahami peristiwa, transaksi dan praktik yang menurut pertimbangan auditor kemungkinan berdampak signifikan atas laporan keuangan atau atas laporan pemeriksaan atau laporan audit (PSA No.67 SA Seksi 318, 2011).

b. Pertimbangan pengendalian internal

Suatu proses yang dijalankan oleh dewan komisaris, manajemen, dan personel lain entitas yang didesain untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian keandalan pelaporan keuangan, efektivitas dan efisiensi operasi, dan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. Auditor harus memperoleh pemahaman tentang pengendalian intern yang memadai untuk merencanakan audit dengan melaksanakan prosedur untuk memahami desain pengendalian yang relevan dengan audit atas laporan keuangan dan apakah pengendalian intern tersebut dioperasikan (PSA No.69 SA Seksi 319, 2011).

c. Pertimbangan auditor atas fungsi audit intern

Auditor mempertimbangkan banyak faktor dalam menentukan sifat dan lingkup prosedur audit yang harus dilaksanakan dalam suatu audit atas laporan keuangan entitas. Salah satu faktor adalah eksistensi fungsi audit intern. Tanggung jawab penting fungsi audit intern adalah memantau kinerja pengendalian entitas. Oleh karena itu auditor harus berusaha memahami fungsi audit intern yang cukup untuk mengidentifikasi aktivitas audit intern yang relevan dengan perencanaan audit (PSA No.33 SA Seksi 322, 2011).

d. Informasi asersi manajemen

Asersi adalah pernyataan manajemen yang terkandung di dalam komponen

laporan keuangan. Asersi manajemen diklarifikasikan menjadi lima yaitu: keberadaan (existence or occurrence), kelengkapan (completeness), hak dan kewajiban (right and obligation), penilaian (valuation), serta penyajian dan pengungkapan (presentation and disclosure). Informasi manajemen digunakan auditor untuk memperoleh bukti audit yang mendukung asersi dalam laporan keuangan (PSA No.7 SA Seksi 326, 2011).

e. Prosedur analitik

Prosedur analitik merupakan bagian penting dalam proses audit dan terdiri dari evaluasi terhadap informasi keuangan yang dibuat dengan mempelajari hubungan yang masuk akal antara data keuangan yang satu dengan data keuangan yang lainnya atau antara data keuangan dengan data non keuangan. Tujuan penggunaan prosedur analitik adalah membantu auditor dalam merencanakan sifat dan lingkup prosedur analitik lainnya, sebagai pengujian substantive untuk memperoleh bukti tentang asersi tertentu yang berhubungan saldo akun dan sebagai review menyeluruh informasi keuangan pada review akhir audit (PSA No.22 SA Seksi 329, 2011).

f. Proses konfirmasi

Proses konfirmasi adalah proses pemerolehan dan penilaian suatu komunikasi dari pihak ketiga sebagai jawaban atas suatu permintaan informasi tentang unsur tertentu yang berdampak terhadap asersi laporan keuangan. Proses konfirmasi mencakup pemilihan unsur yang dimintakan konfirmasi, pendesainan permintaan konfirmasi, pengkomunikasian permintaan konfirmasi kepada pihak ketiga yang bersangkutan, pemerolehan jawaban dari pihak ketiga dan penilaian terhadap informasi, atau tidak adanya informasi yang disediakan oleh pihak ketiga mengenai tujuan audit, termasuk keandalan informasi tersebut (PSA No.07 SA Seksi 330,2011).

g. Representasi manajemen

Representasi manajemen merupakan bagian dari bukti audit yang diperoleh auditor. Representasi tertulis dari manajemen biasanya menegaskan representasi lisan yang disampaikan oleh manajemen kepada auditor dan menunjukkan serta mendokumentasikan lebih lanjut ketepatan representasi tersebut, dan mengurangi kemungkinan salah paham mengenai masalah yang direpresentasi (PSA No.17 SA Seksi 333, 2011).

h. Pengujian pengendalian teknik audit berbantuan computer

Auditor harus mempertimbangkan suatu kombinasi semestinya teknik audit secara manual dan Teknik Audit Berbantuan Komputer (TABK). Beberapa manfaat penggunaan TABK adalah tidak adanya dokumen masukan atau

tidak adanya jejak audit (audit trail) dapat mengharuskan auditor menggunakan TABK dalam penerapan pengujian pengendalian dan pengujian substansif dan efektivitas dan efisiensi prosedur audit dapat meningkatkan dengan penggunaan TABK. Penggunaan TABK dikendalikan auditor untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa tujuan audit dan spesifikasi rinci TABK telah dipenuhi serta TABK tidak dimanipulasi semestinya oleh staf entitas (PSA No.59 SA Seksi 327, 2011).

i. Sampling audit

Sampling audit adalah penerapan prosedur audit terhadap kurang dari seratus persen unsur saldo akun atau kelompok transaksi dengan tujuan untuk menilai beberapa karakteristik saldo akun atau kelompok transaksi tersebut. Sampling audit digunakan auditor untuk mengetahui saldo-saldo akun dan transaksi yang mungkin sekali mengandung salah saji. Langkah yang diperlukan dalam sampling audit untuk pengujian atas rincian saldo adalah menyusun rencana pemilihan sampel, kemudian menerapkan prosedur audit atas sampel yang telah ditetapkan dan menilai sampel audit dari kesimpulan hasil audit yang telah dilakukan oleh auditor (PSA No.26 SA Seksi 350, 2011).

j. Perhitungan fisik persediaan dan kas

Perhitungan fisik berkaitan dengan pemeriksaan auditor melalui pengamatan, pengujian, dan permintaan keterangan yang memadai atas efektivitas metode perhitungan fisik persediaan atau kas dan mengukur keandalan atas kuantitas dan kondisi persediaan atau kas klien (PSA No.07 SA Seksi 331, 2011).

### **2.1.4.3 Peraturan auditor dalam melaksanakan prosedur audit**

Menurut Nomor 14/IAPI/2008 Auditor harus melaksanakan prosedur audit berikut ini untuk membantu dalam menemukan kejadian atas ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan lain yang dapat berdampak material terhadap laporan keuangan: (Ref:Para.A9-A10)

- a. Meminta keterangan kepada manajemen dan, apabila releva, pihak-pihak yang bertanggung jawab atas tata Kelola, mengenai tingkat kepatuhan entitas terhadap peraturan perundang-undangan tersebut; dan
- b. Menginspeksi korespondendi, jika ada, dengan pihak berwenang yang menerbitkan izin atau peraturan.

Keputusan peraturan otoritas jasa keuangan NOMOR 13/POJK.03/2017 tentang penggunaa jasa akuntan publik dan kantor akuntan publik dalam kegiatan jasa keuangan bahwa pihak yang melaksanakan kegiatan jasa keuangan yang diatur dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan perlu menyusun dan menyajikan informasi keuangan yang berkualitas.

Keputusan peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 13/pojk.03/2017 bab ii tentang pengelolaan administrasi akuntan publik dan kantor akuntan publik (pasal 7 ayat 2) AP dan KAP yang terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan wajib menjalani pemeriksaan yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas kepatuhan terhadap pekerjaan pemeriksaan dan penerapan pengendalian mutu atas kegiatan jasa yang diberikan oleh AP dan/atau KAP kepada pihak yang melaksanakan kegiatan jasa keuangan.

#### 2.1.4.4 Pengertian Penghentian Prematur atas Prosedur Audit

Menurut Surya dan Mertha (2014:15) penghentian prematur atas prosedur audit adalah:

“Penghentian prematur didefinisikan sebagai suatu keadaan yang menunjukkan auditor menghentikan satu atau beberapa langkah audit yang diperlukan dalam prosedur audit tanpa menggantinya dengan langkah yang lain.”

Menurut Maulina (2010:2) penghentian prematur atas prosedur audit adalah:

“Penghentian prematur atas prosedur audit adalah auditor tidak melakukan prosedur audit seperti yang disyaratkan dengan lengkap dan melakukan penghentian prosedur secara sengaja, tetapi auditor tersebut masih memberikan opini dan menarik kesimpulan tanpa adanya peninjauan mendalam yang sesuai dengan prosedur audit yang ada.”

Menurut Haryanto (2015:56) penghentian prematur atas prosedur audit adalah:

“*Prematur sign off* (penghentian prematur prosedur audit) diartikan sebagai suatu praktik ketika auditor mendokumentasikan prosedur audit secara lengkap tanpa benar-benar melakukannya atau mengabaikan atau tidak melakukan beberapa prosedur audit yang disyaratkan tetapi auditor dapat memberikan opini atas suatu laporan keuangan.”

Penghentian prematur merupakan pengurangan mutu dalam pelaksanaan audit yang dilakukan secara sengaja oleh auditor. Pengurangan mutu ini dapat dilakukan melalui tindakan seperti mengurangi jumlah sampel dalam audit, melakukan *review* dangkal terhadap dokumen klien, tidak memperluas pemeriksaan ketika terdapat item yang dipertanyakan dan pemberian opini saat semua prosedur audit yang disyaratkan belum dilakukan dengan lengkap. Ketika melakukan pengabaian, auditor akan

memiliki kecenderungan untuk memilih prosedur yang paling tidak beresiko di antara semua prosedur audit di dalam standar yang telah ditetapkan (Weningtyas, 2006).

Berdasarkan definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa penghentian prematur atas prosedur audit merupakan suatu kondisi di mana dalam melaksanakan prosedur audit, auditor tidak melakukan pekerjaan secara lengkap tetapi berani mengeluarkan opini terhadap laporan keuangan yang diauditnya.

#### **2.5.2.5 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penghentian Prematur atas Prosedur Audit**

Menurut Indarto (2011:95) faktor-faktor yang mempengaruhi penghentian premature atas prosedur audit yaitu:

*a. Time Pressure*

Dalam melaksanakan proses audit, auditor harus dapat mempertimbangkan biaya dan waktu yang tersedia. Pertimbangan tersebut menimbulkan time pressure atau tekanan waktu. Jika waktu yang dialokasikan tidak cukup, auditor akan bekerja dengan cepat, sehingga hanya melaksanakan sebagian prosedur audit yang disyaratkan.

*b. Risiko Audit*

Dalam perencanaan audit, auditor juga harus mempertimbangkan risiko audit. Auditor memberikan pendapat atas laporan keuangan secara keseluruhan berdasarkan bukti yang diperoleh melalui pemeriksaan atas asersi-asersi yang berhubungan dengan setiap saldo rekening atau kelompok transaksi. Jika seorang auditor tidak dapat mendeteksi adanya salah saji yang material maka auditor hanya melaksanakan sebagian prosedur yang telah ditetapkan.

*c. Materialitas*

Besarnya salah saji dari salah saji informasi akuntansi, yang mana dalam kondisi tertentu akan berpengaruh terhadap perubahan pengambilan

keputusan yang diambil atas informasi yang mengandung salah saji tersebut. Saat auditor menetapkan bahwa materialitas yang melekat pada suatu prosedur audit rendah, maka terdapat kecenderungan bagi auditor untuk mengabaikan prosedur audit tersebut.

d. *Prosedur Review* dan Kontrol Kualitas

*Prosedur review* merupakan proses memeriksa atau meninjau ulang hal atau pekerjaan untuk mengatasi terjadinya indikasi ketika staf auditor telah menyelesaikan tugasnya, padahal tugas yang diisyaratkan tersebut gagal dilakukan. *Prosedur* ini berperan dalam memastikan bahwa bukti pendukung telah lengkap dan juga melibatkan pertimbangan ketika terdapat sugesti bahwa penghentian prematur atas prosedur audit telah terjadi. Fokus dari prosedur review ini terutama pada permasalahan yang terkait pada pemberian opini, sedangkan kontrol kualitas lebih fokus pada pelaksanaan audit sesuai standar audit. Pelaksanaan prosedur *review* yang baik akan meningkatkan kemungkinan terdeteksinya perilaku penyimpangan dalam audit seperti praktik penghentian prematur atas prosedur audit. Kemudahan pendeteksian ini akan membuat auditor berpikir dua kali ketika melakukan tindakan penghentian prematur atas prosedur audit.

e. *Komitmen Organisasi*

*Komitmen organisasi* adalah bagaimana seseorang memiliki dorongan dalam dirinya untuk berbuat sesuatu agar menunjang keberhasilan organisasi tempatnya bekerja sesuai dengan tujuan dan kepentingan organisasi. *Komitmen organisasi* yang tinggi menjadikan seorang individu merasa memiliki organisasi dan ingin selalu memajukan organisasi. *Komitmen organisasi* yang kuat akan mendorong individu berusaha keras mencapai tujuan organisasi. Individu yang tidak memiliki *komitmen organisasi* akan bekerja apa adanya tanpa upaya inovatif dan kreatif dalam mencapai tujuan organisasi, sehingga hanya melaksanakan sebagian prosedur audit yang ditetapkan.

f. *Komitmen Profesional*

*Komitmen profesional* dapat diartikan sebagai intensitas identifikasi dan keterlibatan individu dengan profesi tertentu. Identifikasi ini membutuhkan beberapa tingkat kesepakatan antara individu dengan tujuan dan nilai profesi termasuk nilai moral dan etika. *Komitmen profesional* digambarkan sebagai suatu format fokus karir pada komitmen pekerjaan yang menekankan pentingnya suatu profesi di masa hidup seseorang. Individu berkomitmen pada suatu profesi apabila menganggap profesi tersebut merupakan suatu

kewajiban dan tanggung jawabnya dan jika ditinggalkan maka akan kehilangan hal-hal yang berkaitan dengan profesi tersebut misalnya keahlian, status, dan penghargaan, sehingga menyebabkan tindakan penghentian prematur atas prosedur audit ini dilakukan.

g. Pengalaman Audit

Pengalaman menciptakan struktur pengetahuan, yang terdiri atas suatu sistem dari pengetahuan yang sistematis dan abstrak. Pengetahuan ini tersimpan dalam memori jangka panjang dan dibentuk dari lingkaran pengalaman langsung masa lalu. Pengalaman auditor dapat memperoleh pengetahuan dan mengembangkan struktur pengetahuannya. Auditor yang berpengalaman akan lebih memiliki banyak pengetahuan dan struktur memori lebih baik dibandingkan dengan auditor yang belum berpengalaman. Semakin banyak pengalaman auditor maka auditor semakin bisa menghasilkan berbagai macam dugaan dalam temuan audit, dan juga tidak melakukan tindakan penghentian prematur atas prosedur audit.

h. Kesadaran Etis

Kesadaran etis adalah tanggapan atau penerimaan seseorang terhadap suatu peristiwa moral tertentu melalui suatu proses penentuan yang kompleks sehingga dia dapat memutuskan apa yang dia lakukan pada situasi tertentu. Motif kesadaran akan membantu auditor dalam memprediksi suatu keputusan yang tidak terencana maupun ketika dihadapkan pada keputusan yang terencana dengan baik, agar dapat menghadapi risiko dan ketidakpastian dalam mengambil suatu tindakan, sehingga kemungkinan untuk terjadinya penghentian prematur atas prosedur audit dapat dihindarkan. Auditor yang berpengalaman akan lebih memiliki banyak pengetahuan dan struktur memori lebih baik dibandingkan dengan auditor yang belum berpengalaman. Semakin banyak pengalaman auditor maka auditor semakin bisa menghasilkan berbagai macam dugaan dalam temuan audit, dan juga tidak melakukan tindakan penghentian prematur atas prosedur audit.

i. Kesadaran Etis

Kesadaran etis adalah tanggapan atau penerimaan seseorang terhadap suatu peristiwa moral tertentu melalui suatu proses penentuan yang kompleks sehingga dia dapat memutuskan apa yang dia lakukan pada situasi tertentu. Motif kesadaran akan membantu auditor dalam memprediksi suatu keputusan yang tidak terencana maupun ketika dihadapkan pada keputusan yang terencana dengan baik, agar dapat menghadapi risiko dan ketidakpastian dalam mengambil suatu tindakan, sehingga kemungkinan untuk terjadinya

penghentian premature atas prosedur audit dapat dihindarkan.

#### **2.1.4.6 Tindakan Auditor yang Berpotensi Penghentian Prematur atas Prosedur Audit**

Berbagai bentuk tindakan yang dilakukan auditor dalam pelaksanaan program audit yang berpotensi mengurangi kualitas audit menurut Herrbach (2001) dan Pierce Sweeney (2004) dalam Silaban (2009:45) tindakan-tindakan tersebut adalah sebagai berikut:

- a. *Review* yang dangkal terhadap dokumen klien  
Suatu tindakan yang dilakukan auditor dengan tidak memberi perhatian yang memadai atas keakuratan dan validitas dokumen klien.
- b. Pengujian terhadap sebagian item sampel  
Suatu tindakan yang dilakukan auditor dengan tidak melaksanakan prosedur audit pada seluruh item sampel yang didesain dalam program audit.
- c. Tidak menginvestigasi lebih lanjut item yang diragukan  
Suatu tindakan yang dilakukan auditor dengan tidak memperluas tindakan pengujian ketika terdeteksi suatu transaksi atau pos yang mencurigakan.
- d. Penerimaan atas penjelasan klien yang lemah  
Suatu tindakan yang dilakukan auditor dengan menerima penjelasan klien sebagai substitusi atau pengganti suatu bukti audit yang tidak diperoleh selama pelaksanaan audit.
- e. Tidak meneliti prinsip akuntansi yang diterapkan klien  
Suatu tindakan yang dilakukan auditor dengan tidak meneliti lebih lanjut kesesuaian perlakuan akuntansi yang ditetapkan klien dengan prinsip akuntansi.
- f. Pengurangan pekerjaan audit pada level yang lebih rendah dari yang disyaratkan dalam program audit  
Suatu tindakan yang dilakukan auditor dengan mengurangi pekerjaan audit yang dilakukan dari yang seharusnya dilaksanakan sesuai dengan program audit.
- g. Penggantian prosedur audit dari yang ditetapkan dalam program audit  
Suatu tindakan yang dilakukan auditor dengan tidak mengikuti prosedur yang ditetapkan dalam program audit.

- h. Pengendalian berlebihan terhadap hasil pekerjaan klien  
Suatu tindakan yang dilakukan auditor dengan mengandalkan bukti audit atas hasil pekerjaan yang dilakukan klien.
- i. Pendokumentasian bukti audit yang tidak sesuai dengan kebijakan kantor akuntan publik  
Suatu tindakan yang dilakukan auditor dengan tidak mendokumentasikan bukti audit atas pelaksanaan suatu prosedur audit yang disyaratkan sesuai program audit yang ditetapkan oleh kantor akuntan publik.

#### **2.1.4.7 Dampak Tindakan Penghentian Prematur atas Prosedur Audit**

Pengurangan kualitas audit yang banyak terjadi saat ini adalah tidak dilakukannya semua prosedur audit yang disyaratkan, sehingga dapat berpengaruh terhadap pendapat yang akan diberikan oleh auditor. Bukan tidak mungkin pendapat yang diberikan salah dan tidak menggambarkan situasi sebenarnya yang terjadi (Rikarbo, 2012). Melakukan pengurangan jumlah sampel dari yang seharusnya, melakukan review dangkal dan meninggalkan satu atau beberapa prosedur audit yang disyaratkan merupakan tindakan yang terindikasi sebagai penghentian prematur atas prosedur audit (Liantih, 2010).

Profesi akuntan publik merupakan profesi kepercayaan masyarakat, dari profesi akuntan publik inilah masyarakat mengharapkan penilaian yang bebas tidak memihak terhadap informasi yang disajikan oleh manajemen perusahaan dalam laporan keuangan. Dengan adanya perilaku tindakan penghentian prematur atas prosedur audit ini menjadi ancaman serius terhadap kualitas audit karena bukti-bukti audit yang dikumpulkan selama pelaksanaan prosedur audit tidaklah kompeten dan cukup sebagai dasar bagi auditor untuk menyatakan pendapat mengenai kewajaran

laporan keuangan yang diaudit. Penyimpangan ini dapat menyebabkan menurunnya kualitas audit yang dihasilkan oleh auditor dan akhirnya berdampak pada rendahnya kepercayaan pemakai terhadap laporan audit yang dihasilkan oleh auditor. Sehingga rendahnya kepercayaan pemakai laporan audit menjadi ancaman bagi profesi auditor (Trinaldi, 2014).

Akibat maraknya perilaku pengurangan kualitas audit maka dibutuhkan pengendalian yang ketat pada prosedur audit yang dilakukan auditor. Penghentian sebelum semua prosedur audit dilakukan oleh auditor bisa terjadi lantaran pengaruh dari faktor internal maupun situasional yang dialami oleh auditor. Tindakan tersebut dapat berpengaruh langsung terhadap kualitas laporan audit yang dihasilkan auditor, apabila salah satu langkah dalam prosedur audit dihilangkan, maka kemungkinan auditor membuat judgment yang salah akan semakin tinggi (Andani dan Mertha, 2014).

## **1.5 Kerangka Pemikiran**

### **2.2.1 Pengaruh Tindakan Supervisi Auditor terhadap Penghentian Prematur atas Prosedur Audit**

Tindakan supervisi sangat penting dalam audit karena banyaknya pekerjaan yang harus dikerjakan oleh junior auditor. Sebagian besar pekerjaan lapangan dilakukan oleh junior auditor, oleh karena itu untuk menjaga agar audit yang dilaksanakan memenuhi standar yang telah ditetapkan maka perlu dilakukan supervisi (Arens et al, 2008).

Berdasarkan penelitian Andi Tri J (2016) dalam Dyana Esty (2020) tindakan supervisi berpengaruh positif terhadap penghentian prematur atas prosedur audit. Peranan dari supervisi yang baik akan dapat meningkatkan kemungkinan terdeteksinya penghentian prematur atas prosedur audit yang merupakan sebagai salah satu bentuk penyimpangan perilaku audit (Fifi, 2015:2).

Penelitian terdahulu seperti Marina F Sitorus (2017) menyatakan bahwa badan instansi yang pelaksanaan supervisinya kurang baik, tidak melakukan prosedur review dan kontrol kualitas berakibat pada tindakan atau keinginan auditor untuk melakukan penghentian prematur atas prosedur audit semakin tinggi.

Teori atribusi, dalam peranan dari supervisi yang baik akan dapat meningkatkan kemungkinan terdeteksinya penghentian prematur atas prosedur audit sebagai salah satu bentuk penyimpangan perilaku audit (Rosalina, 2011). Junaidi (2016) menyatakan bahwa semakin tinggi tindakan supervisi maka semakin tinggi

penghentian prematur atas prosedur audit. Berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan Asrini (2014:8) yang menyebutkan bahwa tindakan supervisi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penghentian prematur atas prosedur audit.

Semakin ketat proses pengawasan atau monitoring yang dilakukan oleh supervisor akan semakin rendah keinginan dari auditor untuk melakukan penghentian prematur atas prosedur audit (Rapina, 2011).

### **2.2.2 Pengaruh *Time Pressure* terhadap Penghentian Prematur atas Prosedur Audit**

Menurut Rhode (1978) disimpulkan dalam *Commission on Auditor's Responsibilities Report* (1978), bahwa *time pressure* akan menimbulkan perilaku disfungsional yaitu *premature sign off*. *Premature sign off* yaitu pengurangan tahap audit sebagai dampak dari *time pressure* seorang auditor tanpa mencatat pekerjaan atau tahap yang dihilangkan tersebut. Perilaku tersebut secara langsung akan mengancam serius pada kualitas audit. Artinya bahwa semakin besar *time budget pressure* maka akan meningkatkan auditor untuk melakukan *premature sign off* yang semakin besar pula.

Menurut Lestari (2010) menyatakan bahwa auditor yang mendapatkan *time pressure* yang tinggi dapat meningkatkan probabilitas dalam menghentikan prematur prosedur audit.

Penelitian Weningtyas dkk. (2007) menunjukkan *time pressure* mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap penghentian prematur atas prosedur audit. Hubungan antara *time pressure* dan penghentian premature atas prosedur audit bersifat positif. Semakin tinggi tekanan waktu yang dialami auditor maka semakin besar pula kecenderungan untuk melakukan perilaku penghentian prematur atas prosedur audit sehingga akan menurunkan kualitas hasil audit..

### **2.2.3 Pengaruh Tindakan Supervisi Auditor Dan *Time Pressure* Terhadap Penghentian Prematur Atas Prosedur Audit**

Peranan dari tindakan supervisi yang baik akan dapat meningkatkan kemungkinan terdeteksinya penghentian prematur atas prosedur audit. Jika semakin tinggi tindakan supervisi maka akan dapat mendeteksi dan mengurangi terjadinya tindakan penghentian prematur atas prosedur audit yang dilakukan oleh auditor (Maulina dkk, 2010).

Menurut Wianto (2018) Tindakan supervisi adalah tindakan mengawasi dan mengarahkan penyelesaian pekerjaan yang dilakukan oleh auditor senior yang diukur dari sikap kepemimpinan dan mentoring, kondisi kerja, dan penugasan. Tindakan supervisi merupakan hal yang penting, tindakan supervisi mencakup pengarahan kepada asisten yang terkait dalam pencapaian tujuan audit dan penentuan apakah tujuan tersebut tercapai.

Auditor melakukan penghentian prematur atas prosedur audit disebabkan oleh tindakan supervisi yang kurang ketat dalam melakukan monitoring terhadap aktivitas audit, sehingga auditor cenderung untuk melakukan penghentian prematur atas prosedur audit dalam Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) yang berlaku (Rapina, 2011).

Dalam Aji (2013) jika waktu yang dialokasikan tidak cukup, auditor akan bekerja dengan cepat sehingga hanya dapat melaksanakan sebagian prosedur audit yang disyaratkan. Auditor diharapkan dapat untuk menyelesaikan prosedur audit yang dapat diselesaikan dalam waktu yang sesingkat mungkin sesuai dengan batas waktu penugasan dan menghasilkan laporan audit tepat pada jangka waktu yang telah ditetapkan. Pada penelitian Ulum (2005:hal 209) mengenai Pengaruh Orientasi Etika terhadap Hubungan antara *Time Pressure* dengan perilaku *Prematur Sign-off* Prosedur Audit hasilnya menunjukkan bahwa *Time pressure* secara statistik tidak berpengaruh secara signifikan terhadap *Prematur sign-off* prosedur audit tetapi penghentian prematur terhadap prosedur audit

Menurut Rosdiana (2017:125) Penghentian Prematur atas Prosedur Audit (*Premature Sign Off*) merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh seorang auditor ketika melakukan proses audit untuk menghentikan satu atau beberapa langkah audit yang sangat dibutuhkan dalam prosedur audit tanpa menggantikan dengan langkah audit yang lain serta mengabaikan beberapa prosedur audit namun auditor dapat mengeluarkan opini atas suatu laporan keuangan perusahaan yang diaudit tersebut.

Basuki dan Krisna (2006) mengatakan bahwa penghentian prematur atas prosedur audit memiliki dampak secara langsung terhadap kualitas audit karena dapat memungkinkan auditor tidak mampu menemukan error dan irregularities yang terjadi pada laporan keuangan klien.

## 2.2.4 Bagan Kerangka Pemikiran

### Landasan Teori

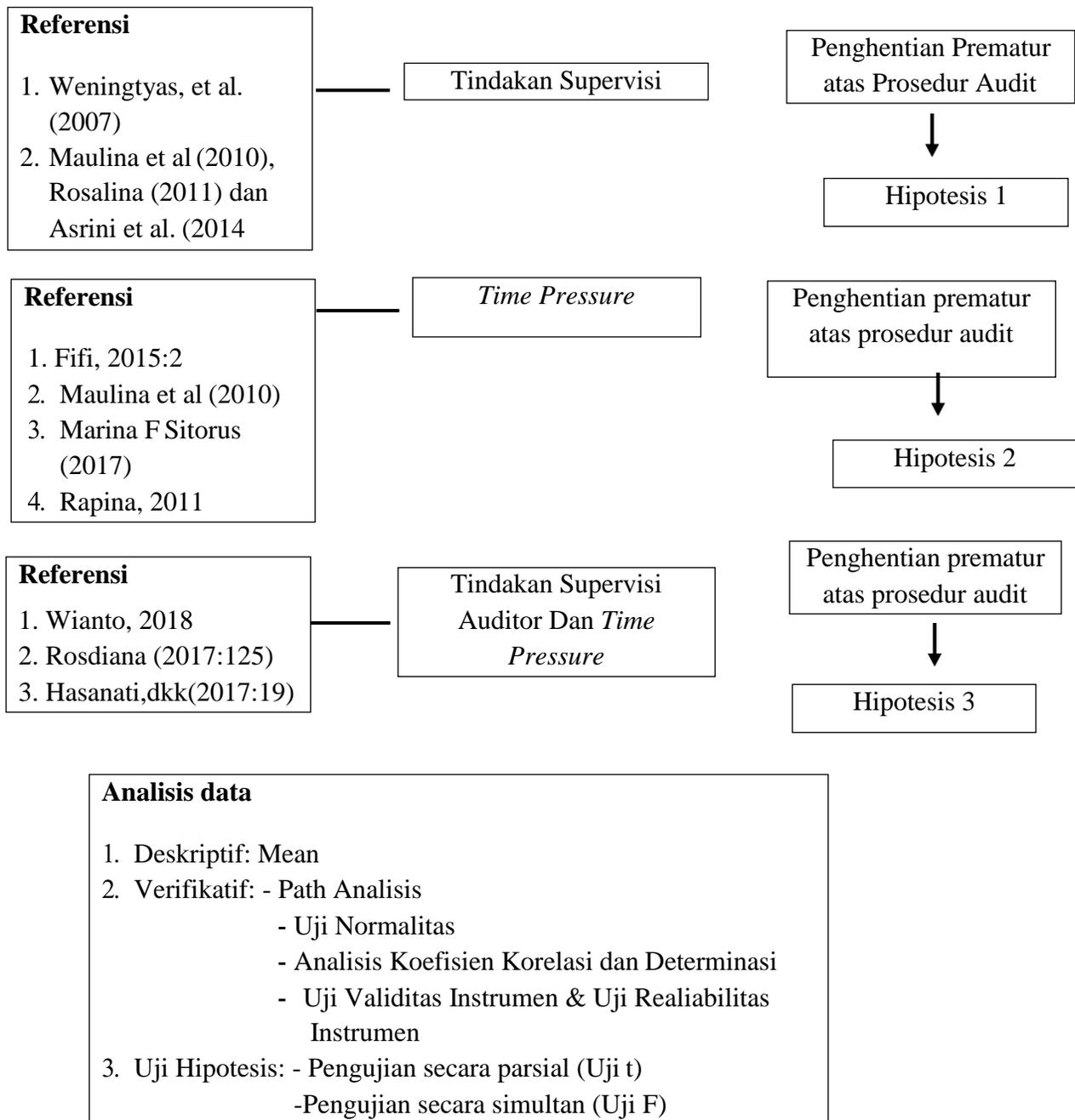
1. Tindakan Supervisi Auditor  
Sukrisno Agoes (2012:143), PSA No.5 Tahun 2001 (SA Seksi 311:311.1), SPAP (SPM Seksi 100, PSPM No.01), Arens et. al., 2008:43, Ignasia Niken (2005)
2. Time Pressure  
Krusni (2011), Sulastiningsih dan Candra (2016:43), Rosdiana (2017:121), Wahyudi, et al, (2011)
3. Penghentian Prematur Atas Prosedur Audit  
Surya (2013:15), Maulina (2010:2), Haryanto (2015)

### Referensi

1. I Made Wianto Putra (2018)
2. Febriana Kusumaningrum (2016)
3. Ni Made Surya Andani (2014)
4. Marina F.Sitorus (2017)

### Data penelitian

1. Populasi dalam penelitian ini adalah auditor yang bekerja pada KAP Kota Bandung yang terdaftar di OJK
2. Kuesioner 35 Responden
3. Faktor-faktor yang memengaruhi penghentian prematur atas prosedur audit



**Gambar 2. 1**

**Bagan kerangka pemikiran**

### 2.2.5 Hasil Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini dapat berfungsi sebagai dasar pendukung dalam melakukan penelitian. Tujuannya yaitu untuk mengetahui hasil yang dilakukan oleh peneliti terdahulu, selain itu juga untuk melihat persamaan dan perbedaan dari penelitian sebelumnya. Ringkasan tabel dari penelitian terdahulu yang mendukung penelitian penulis adalah sebagai berikut:

**Tabel 2. 1**  
**Penelitian terdahulu**

No	Nama Peneliti/Tahun	Judul Penelitian	Variable Yang Diteliti	Hasil Penelitian
1	I Made Wianto Putra (2018)	Pengaruh time pressure, tindakan supervisi, audit risk, materialitas, prosedur review, dan kesadaran etis terhadap penghentian premature atas prosedur audit	Variabel dependen (Y): penghentian prematur atas prosedur audit  Variabel independen (X): time pressure, tindakan supervisi, audit risk, materialitas, prosedur review, dan kesadaran etis	Time pressure, audit risk, materialitas, dan berpengaruh positif signifikan terhadap penghentian prematur atas prosedur audit sedangkan tindakan supervisi, prosedur review, dan kesadaran etis berpengaruh negatif signifikan pada penghentian prematur atas prosedur audit

2	Febriana Kusumaningrum (2016)	Pengaruh tekanan waktu, tindakan supervisi, risiko audit, locus of control dan komitmen profesional terhadap penghentian prematur atas prosedur audit	Variabel dependen (Y): penghentian atas prosedur audit  Variabel independen (X): tekanan waktu, tindakan supervisi, risiko audit, locus of control dan komitmen profesional	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa risiko audit berpengaruh terhadap penghentian prematur atas prosedur audit
3	Ni Made Surya Andani (2014)	Pengaruh time pressure, audit risk, professional commitment dan locus of control pada penghentian prematur atas prosedur audit	Variabel dependen (Y): penghentian atas prosedur audit  Variabel independen (X): time pressure, audit risk, professional commitment dan locus of control	Time pressure dan audit risk berpengaruh positif signifikan terhadap penghentian prematur atas prosedur audit, sedangkan professional commitment dan locus of control berpengaruh negatif signifikan pada penghentian prematur atas prosedur audit
4	Marina F.Sitorus (2017)	Pengaruh tekanan waktu, tindakan supervisi, prosedur review	Variabel dependen (Y): penghentian	Tekanan waktu, tindakan supervisi, prosedur review dan kontrol kualitas

		dan kontrol kualitas, dan komitmen profesional terhadap penghentian prematur atas prosedur audit	atas prematur prosedur audit Variabel independen (X): tekanan waktu, tindakan supervisi, prosedur review dan kontrol kualitas, dan komitmen profesional	berpengaruh signifikan, sedangkan komitmen profesional tidak berpengaruh signifikan terhadap penghentian prematur atas prosedur audit
5	Trinaldi (2014)	Pengaruh risiko audit, materialitas, prosedur dan kualitas, komitmen profesional terhadap prematur sign off	Variabel dependen (Y): penghentian atas prematur prosedur audit Variabel independen (X): risiko audit, materialitas, prosedur review dan kontrol kualitas, dan komitmen profesional	Risiko audit, materialitas, prosedur review dan kontrol kualitas, komitmen profesional berpengaruh signifikan terhadap prematur sign off
6	Andani dan Merta (2011)	Pengaruh time pressure, audit risk, professional commitment dan locus of control pada penghentian prematur atas	Variabel dependen (Y): Penghentian atas prematur prosedur audit	Time pressure dan audit risk berpengaruh positif signifikan pada penghentian prematur atas prosedur, sedangkan

		prosedur audit	Variabel independen (X):	professional commitment dan locus of control berpengaruh negatif signifikan pada penghentian premature atas prosedur audit
7	Wibowo (2010)	Pengaruh time pressure, resiko audit, materialitas, produk review, dan kontrol kualitas terhadap penghentian prematur atas prosedur audit		time pressure, resiko audit, materialitas, produk review, dan kontrol kualitas berpengaruh terhadap penghentian prematur atas prosedur audit

Berdasarkan penelitian terdahulu terdapat beberapa faktor-faktor yang diduga mempengaruhi penghentian prematur atas prosedur audit adalah sebagai berikut:

1. Faktor *time pressure* oleh Ni Made Surya Andani (2014), Nita Adriyani Budiman (2013), Febriana Kusumaningrum (2016), I Made Wianto Putra (2018)
2. Faktor tindakan supervisi oleh I Made Wianto Putra (2018), Marina F.Sitorus (2017)
3. Faktor risiko audit oleh I Made Wianto Putra (2018), Trinaldi (2014), Ni Made Surya Andani (2014), Nita Adriyani Budiman (2013), Febriana Kusumaningrum (2016)
4. Faktor materialitas oleh I Made Wianto Putra (2018), Trinaldi (2014), Nita Adriyani Budiman (2013)

5. Faktor prosedur review oleh I Made Wianto Putra (2018), Trinaldi (2014), Marina F.Sitorus (2017), Nita Adriyani Budiman (2013)
6. Faktor kontrol kualitas oleh Marina F.Sitorus (2017), Nita Adriyani Budiman (2013), Trinaldi (2014)
7. Faktor locus of control oleh Ni Made Surya Andani (2014), Nita Adriyani Budiman (2013)
8. Faktor komitmen profesional oleh Marina F.Sitorus (2017), Trinaldi (2014), Febriana Kusumaningrum (2016)

**Tabel 2. 2**

**Faktor-faktor yang mempengaruhi penghentian premature atas prosedur audit**

<b>Peneliti</b>	<b>Tahun</b>	<b>Time pressure</b>	<b>Supervisi</b>	<b>Resiko</b>	<b>Materialitas</b>	<b>Presedur review</b>	<b>Kontrol kualitas</b>	<b>Locus of control</b>	<b>Komitmen profesional</b>
Wibowo	2010	X	-	√	x	√	√	-	-
Andani dan merta	2011	√	-	√	-	-	-	x	x
Imam wahyudi	2012	X	-	x	√	x	x	-	x
Trinaldi	2014	-	-	√	√	√	√	-	-
Ni made surya andani	2014	√	-	√	-	-	-	√	√
Febriana kusumaningrum	2016	√	-	√	-	-	-	x	√
Marina f.Sitorus	2017	√	√	-	-	√	√	-	-
I made wianto p	2018	√	√	√	√	x	-	-	-
Dyana esty	2020	-	√	√	-	-	-	-	-
Reika es	2022	√	√						

Keterangan:

Tanda √ = Berpengaruh Signifikan

Tanda x = Tidak Berpengaruh Signifikan

Tanda - = Tidak Diteliti

Berdasarkan tabel penelitian terdahulu di atas, terdapat persamaan variabel tindakan supervisi dan risiko audit dengan penelitian Wibowo (2010), Andani dan Merta (2011), Imam Wahyudi (2012), Trinaldi (2014), Ni Made Surya Andani (2014), Febriana Kusumaningrum (2016), Marina F.Sitorus (2017), I Made Wianto Putra (2018).

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang dilakukan oleh I Made Wianto Putra (2018) dengan judul Pengaruh *Time Pressure*, Tindakan Supervisi, Audit *Risk*, Materialitas, Prosedur *Review*, dan Kesadaran etis terhadap Penghentian Prematur atas Prosedur Audit di BPK-RI Perwakilan Bali. Variabel yang diteliti adalah Penghentian Prematur atas Prosedur Audit sebagai variable dependen, dan variabel independen terdiri dari *Time Pressure*, Tindakan Supervisi, Audit *Risk*, Materialitas, Prosedur *Review*, dan Kesadaran Etis. Unit analisis pada penelitian tersebut adalah auditor yang bekerja pada BPK RI Perwakilan Bali. Populasi dalam penelitian tersebut adalah 50 kuesioner pada BPK RI Perwakilan Bali. Teknik pengambilan data pada penelitian tersebut menggunakan *survey* dengan teknik pengumpulan data dengan menggunakan angket (kuesioner). Hasil penelitian menunjukkan bahwa *time pressure*, tindakan supervisi, audit *risk*, dan materialitas berpengaruh signifikan terhadap penghentian prematur atas prosedur audit, sedangkan prosedur *review* tidak berpengaruh signifikan terhadap penghentian prematur atas prosedur audit.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang direplikasi yaitu populasi

yang digunakan dan tahun yang digunakan. Pada penelitian I Made Wianto Putra populasi yang digunakan adalah seluruh auditor yang bekerja pada Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Republik Indonesia Wilayah Bali, sedangkan dalam penelitian ini populasi yang digunakan adalah auditor yang bekerja pada Kantor Akuntan Publik. I Made Wianto Putra meneliti tahun 2018, sedangkan dalam penelitian ini peneliti melakukan penelitian pada tahun 2022.

### **2.3 Hipotesis Penelitian**

Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara karena jawaban yang diberikan baru didasarkan teori yang relevan, belum didasarkan fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Jadi hipotesis juga dapat dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian, belum jawaban yang empirik (Sugiyono, 2017:63).

Kerangka pemikiran yang telah diuraikan di atas, menjadi landasan bagi penulis untuk mengajukan hipotesis sebagai berikut:

Hipotesis 1 : Tindakan supervisi berpengaruh positif terhadap penghentian prematur atas prosedur audit

Hipotesis 2 : *Time pressure* berpengaruh positif terhadap penghentian prematur atas prosedur audit

Hipotesis 3 : Tindakan supervisi dan *time pressure* berpengaruh secara simultan terhadap penghentian prematur atas prosedur audit

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Metode Penelitian Yang Digunakan**

##### **3.1.1 Pendekatan Penelitian**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan penelitian deskriptif dan verifikatif, di mana dalam penelitian ini berupaya untuk mendeskripsikan dan juga menginterpretasikan pengaruh antar variabel-variabel yang akan ditelaah hubungannya serta tujuannya untuk menyajikan gambaran secara terstruktur, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta hubungan antar variabel yang diteliti.

Pengertian metode deskriptif menurut Sugiyono (2018:48) adalah sebagai berikut:

“Metode penelitian deskriptif ini dilakukan untuk mengetahui keberadaan variabel mandiri, baik hanya pada satu variabel atau lebih (variabel yang berdiri sendiri atau variabel yang bebas) tanpa membuat perbandingan variabel itu sendiri dan mencari hubungan dengan variabel lain”.

Dalam penelitian ini, metode deskriptif akan digunakan untuk menjelaskan tentang tindakan supervisi, *time pressure*, dan penghentian prematur atas prosedur audit.

Definisi metode verifikatif Menurut Nazir (2011:91) adalah sebagai berikut:

“Penelitian verifikatif adalah metode penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan kausalitas antar variabel melalui suatu pengujian hipotesis melalui suatu perhitungan statistik sehingga didapat hasil pembuktian yang menunjukkan hipotesis ditolak atau diterima”.

Dalam penelitian ini metode verifikatif digunakan untuk menjawab rumusan masalah mengenai seberapa besar pengaruh tindakan supervisi terhadap penghentian prematur atas prosedur audit, dan seberapa besar pengaruh *time pressure* terhadap penghentian prematur atas prosedur audit, serta seberapa pengaruh tindakan supervisi dan *time pressure* secara simultan terhadap penghentian prematur atas prosedur audit pada Kantor Akuntan Publik (KAP) di Wilayah Kota Bandung yang terdaftar di OJK.

### **3.1.2 Objek Penelitian**

Menurut Sugiyono (2016:38) pengertian objek penelitian adalah sebagai berikut:

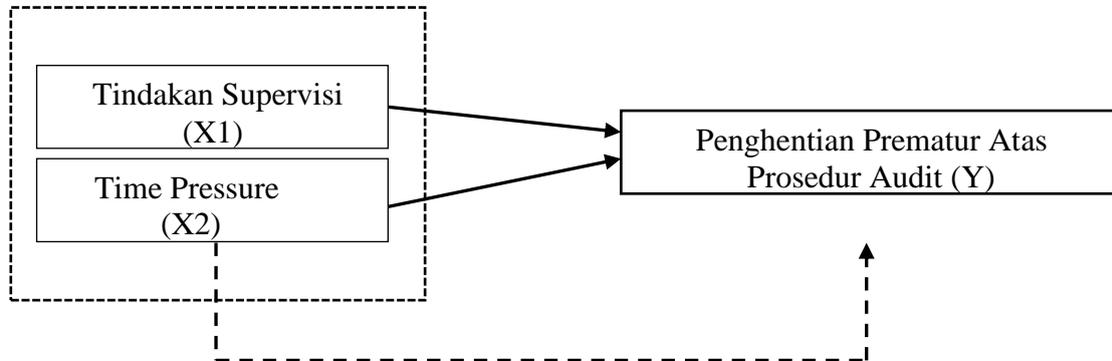
“Suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya”.

Dalam penelitian ini yang menjadi objek penelitian adalah Tindakan Supervisi Auditor , *Time pressure*, dan Penghentian Prematur atas Prosedur Audit pada Kantor Akuntan Publik (KAP) di Wilayah Kota Bandung yang terdaftar di OJK.

### **3.1.3 Model Penelitian**

Model penelitian merupakan abstraksi dari kenyataan-kenyataan atau fenomena-fenomena yang ada dan sedang diteliti. Dalam penelitian ini sesuai dengan judul skripsi yang diambil “Pengaruh Tindakan Supervisi Auditor dan *Time Pressure* terhadap Penghentian Prematur atas Prosedur Audit”, maka model

penelitian yang dapat digambarkan sebagai berikut:



**Gambar 3. 1**  
**Model Penelitian**

**Keterangan:**

- Garis  : Menunjukkan pengaruh variabel independen (X) terhadap variabel dependen (Y) secara parsial
- Garis  : Menunjukkan pengaruh variabel independen (X1) dan (X2) secara simultan terhadap variabel dependen (Y)

## **3.2 Definisi Variabel Penelitian dan Operasionalisasi Variabel Penelitian**

### **3.2.1 Definisi Variabel Penelitian**

#### **3.2.1.1 Variabel Independen (X)**

Menurut Sugiyono (2016:39) Variabel Independen adalah:

“Variabel independen adalah merupakan variabel yang mempengaruhi atau menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen (terikat)”.

Dalam penelitian ini terdapat dua variabel independen yang diteliti yaitu Tindakan Supervisi Auditor ( $X_1$ ) dan *Time Pressure*( $X_2$ ).

#### **3.2.1.1.1 Tindakan Supervisi ( $X_1$ )**

Menurut Soekrisno (2012:143) Tindakan Supervisi adalah:

“Tindakan supervisi adalah pengarahan kepada asisten yang terkait dalam pencapaian tujuan dan menentukan apakah tujuan tersebut tercapai. Unsur-unsur supervisi mencakup tentang pemberian instruksi kepada asisten, tetap menjaga penyampaian informasi masalah penting yang ditemukan dalam audit, me-review pekerjaan yang dilaksanakan mengenai apakah hasilnya sejalan dengan kesimpulan yang disajikan dalam laporan audit, menyelesaikan perbedaan pendapat antara staf audit dan KAP.”

#### **3.2.1.1.2 *Time Pressure*( $X_2$ )**

Menurut Wahyudi, et al, (2011) pengertian *Time Pressure* adalah:

“*Time pressure* adalah suatu keadaan di mana auditor mendapatkan tekanan dari Kantor Akuntan Publik tempatnya bekerja, untuk menyelesaikan audit pada waktu dan anggaran biaya yang telah ditentukan sebelumnya serta akan berdampak negatif terhadap kinerja auditor”,

#### **3.2.1.2 Variabel Dependen (Y) Penghentian Prematur atas Prosedur Audit**

Dalam penelitian ini yang menjadi variabel dependen adalah penghentian prematur atas prosedur audit.

Menurut Haryanto (2015:14) Penghentian Prematur atas Prosedur Audit adalah sebagai berikut:

“*Prematur sign off* (penghentian prematur prosedur audit) diartikan sebagai suatu praktik ketika auditor mendokumentasikan prosedur audit secara lengkap tanpa benar-benar melakukannya atau mengabaikan atau tidak melakukan beberapa prosedur audit yang disyaratkan tetapi auditor dapat memberikan opini atas suatu laporan keuangan.”

### 3.2.2 Operasionalisasi Variabel Penelitian

Tabel 3. 1

**Operasionalisasi Variabel Penelitian**  
**Tindakan Supervisi Auditor (X1)**

Konsep Variabel	Dimensi	Indikator	Skala	Instrumen
Tindakan supervisi adalah pengarahan kepada asisten dalam mencapai tujuan audit dan penentuan apakah tujuan tersebut tercapai.  <i>AECC (Accountant Education Change Commision) Issue Statement No. 4</i>	1. Supervisor hendaknya menunjukkan sikap kepemimpinan	a. Supervisor sering memberikan feedback yang jujur, terbuka, dan interaktif kepada junior di bawah supervisinya	Ordinal	Kuisisioner nomer 1 dan nomer 5
		b. Supervisor memperhatikan keluhan atau masalah yang dihadapi junior auditor	Ordinal	Kuisisioner nomer 2
		c. Supervisor memberikan penjelasan tentang penugasan	Ordinal	Kuisisioner nomer 3
		d. Supervisor dituntut mampu menjadi panutan sebagai professional di bidangnya	Ordinal	Kuisisioner nomer 4
	2. Supervisor hendaknya menciptakan kondisi kerja yang mendorong terjadinya kesuksesan	a. Menumbuhkan sikap mental pada junior auditor untuk bekerja dengan benar	Ordinal	Kuisisioner nomer 5
		b. Mendistribusikan tugas dan beban secara adil dan sesuai dengan tingkat kemampuan junior auditor	Ordinal	Kuisisioner nomer 6
		c. Meminimalkan stres yang berkaitan dengan pekerjaan	Ordinal	Kuisisioner nomer 7
	3. Supervisor hendaknya memberikan tugas yang menantang dan mempercepat terselesaikannya tugas	a. Memaksimalkan kesiapan junior auditor untuk menggunakan kemampuan verbal baik lisan maupun tulisan, berpikiran kritis dan menggunakan teknik analitis serta membantu	Ordinal	Kuisisioner nomer 8

		junior auditor untuk meningkatkan kemampuan		
--	--	---	--	--

Sumber: data diolah penulis

**Tabel 3. 2**  
**Operasionalisasi Variabel Penelitian**  
**Time Pressure (X2)**

<b>Konsep Variabel</b>	<b>Dimensi</b>	<b>Indikator</b>	<b>Skala</b>	<b>Instrument</b>
<p>“Tekanan waktu (<i>time pressure</i>) adalah suatu kondisi dimana auditor mendapatkan tekanan dari tempanya bekerja untuk dapat menyelesaikan tugasnya sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. Auditor dituntut untuk melakukan efisiensi biaya dan waktu dalam melaksanakan audit.” (DeZoort, 1998) Rio Monoarfa (2018:13)</p>	1. Tingkat Pengetatan Anggaran waktu	a. Efisien terhadap anggaran waktu yang telah disepakati	Ordinal	Kuisisioner nomer 1
		b. Pembatasan waktu yang ketat dalam anggaran	Ordinal	Kuisisioner nomer 2
	2. Tingkat Ketercapaian Anggaran waktu  (DeZoort, 1998) Herningsih (2001:45)	a. Menyelesaikan audit tepat waktu	Ordinal	Kuisisioner nomer 3
		b. Tingkat pemenuhan pencapaian <i>time pressure</i> auditor	Ordinal	Kuisisioner nomer 4

Sumber: data diolah penulis

**Tabel 3. 3**

**Operasionalisasi Variabel Penelitian**  
**Penghentian Prematur atas Prosedur Audit (Y)**

<b>Konsep variable</b>	<b>Dimensi</b>	<b>Indikator</b>	<b>Skala</b>	<b>instrumen</b>
Prematur sign off (penghentian prematur prosedur audit) diartikan sebagai suatu praktik ketika auditor mendokumentasikan prosedur audit secara lengkap tanpa benar-benar melakukannya atau mengabaikan atau tidak melakukan beberapa prosedur audit yang disyaratkan tetapi auditor dapat memberikan opini atas suatu laporan keuangan.  (Haryanto, 2015)	Prosedur audit yang dilaksanakan pada tahap perencanaan audit dan tahap pekerjaan lapangan yang telah ditetapkan dalam Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP)	1. Pemahaman bisnis dan industri klien	Ordinal	Kuisisioner nomer 1
		2. Pertimbangan pengendalian internal	Ordinal	Kuisisioner nomer 2
		3. Pertimbangan auditor atas fungsi audit intern	Ordinal	Kuisisioner nomer 3
		4. Informasi asersi manajemen	Ordinal	Kuisisioner nomer 4
		5. Prosedur analitik diperoleh selama pelaksanaan audit	Ordinal	Kuisisioner nomer 5
		6. Proses konfirmasi	Ordinal	Kuisisioner nomer 6
		7. Representasi manajemen	Ordinal	Kuisisioner nomer 7
		8. Pengujian pengendalian teknik audit berbantuan komputer	Ordinal	Kuisisioner nomer 8
		9. Sampling audit	Ordinal	Kuisisioner nomer 9
		10. Perhitungan fisik persediaan dan kas	Ordinal	Kuisisioner nomer 10

Sumber: Data diolah penulis

### 3.3 Populasi, Teknik Sampling, dan Sampel Penelitian

#### 3.3.1 Populasi Penelitian

Peneliti diharuskan untuk menentukan populasi yang akan menjadi objek atau subjek penelitian. Kata populasi sendiri dalam statistika merujuk pada sekumpulan individu dengan karakteristik khas yang menjadi perhatian dalam suatu (pengamatan).

Menurut Sugiyono (2017:80) Populasi adalah:

“Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas subjek atau objek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang diterapkan oleh peneliti untuk dipelajari kemudian ditarik kesimpulannya”.

Berdasarkan pengertian diatas, penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa populasi bukan hanya jumlah pada objek yang dipelajari, tetapi meliputi seluruh karakteristik yang dimiliki objek tersebut dan berada satu wilayah berkaitan dengan masalah penelitian. Dilihat dari uraian di atas, maka yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah auditor pada Kantor Akuntan Publik (KAP) di Kota Bandung dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 3. 4**

**Daftar Kantor Akuntan Publik di Kota Bandung**

No	Nama KAP	Izin	Alamat	Jumlah Auditor
1	KAP Abdul Rasyid, S.E., M.Si., CA., CPA	744/KM.1/2018	Jl. Salaksana baru VII No.2 Bandung 70282	17
2	KAP Af. Rachman & Soetjipto Ws	KEP-216/KM.6/2002	Jl. Pasir Luyu Raya No.36 Bandung 40254	14
3	KAP Dr. Widarsono, M.Si.,	69/KM.1/2019	Margahayu Raya Komplek Galaxy Perum Al Islam, Jl.	15

	Ak., CPA Agus S.e., CA.,		Fisioterapi No.69 Bandung 40286	
4	KAP Asep Rahmansyah Manshur & Suharyono (Cabang)	1169/KM.1/2016	Wartawan II No.16 A Bandung 40266	14
5	KAP Chris, Hermawan	KEP482/KM.1/2017	Ruko Pasar Buah Segar Blok RC 16 Margahayu Selatan Bandung	13
6	KAP Drs. Djaelani Hendrakusumah, CPA., CA., Ak	1015/KM.1/2017	Jl. Babakan Irigasi No. 177 Babakan Tarogong Bandung 40232	16
7	KAP Derdjo Djony Saputro	86/KM.1/2016	Taman Kopo Indah II Blok IV-A No.17 Bandung 40214	15
8	KAP Djoemarna Wahyudin & Rekan	Kep-350/KM17/2000	Dr.Slamet No.55 Bandung 40161	13
9	KAP Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang & Ali (Cabang)	401/KM.1/2013	Haruman No.2 Kel.Malabar Kec.Lengkong Bandung 40262	18
10	KAP Gatot Permadi, Azwir & Abimail (Cabang)	753/KM.1/2018	Jl. Sentradago Utama No.24 Bandung 40291	19
11	KAP Dr.H.E.R Suhardjadinata & Rekan	1510/KM.1/2011	Metro Trade Center Block E No.16. Jl. Soekarno Hatta No.590. Bandung 40286	16
12	KAP Hartman, S.E., Ak., M.M., CA, CPA	1260/KM.1/2017	Ruko Kav.C (Bodogol) RT 008/008 Kel. Mekarjaya, Kec. Rancasari Bandung 40290	21
13	KAP Heliantono & Rekan (Cabang)	KEP147/KM.5/2006	Jl.Sangkuriang No.B1 Bandung 40135	19
14	KAP Jahja Gunawan, S.E., AK., CA., CPA	788/KM.1/2017	Jl. Sunda No.1 Lt 3 Bandung 40261	17
15	KAP Jojo Sunarjo & Rekan (Cabang)	439/KM.1/2013	Jl. Ketuk Tilu No.38 Bandung 40264	11
16	KAP Drs.Joseph Munthe, Ms	KEP197/KM.17/1999	Jl. Terusan Jakarta No.20, Babakan Surabaya, Kec. Kiaracandong, Kota Bandung, Jawa Barat 40281	14
17	KAP Drs.Karel & Widyarta	KEP269/KM.17/1999	Jl. Hariangbanga No.15 Bandung 40116	21

18	KAP Koesbandijah, Beddy Samsi & Rekan	KEP1032/K M.17/1998	Jl. P.H Hasan Mustafa No.58 Bandung 40124	16
19	KAP Kumalahadi, Kuncara, Sugeng Pamudji dan Rekan (Cabang)	341/KM.1/2018	Taman Cibaduyut Indah Blok B No.1 Bandung 40239	11
20	KAP Drs.La Midjan & Rekan	KEP1103/K M.17/1998	Jl.Cigadung Raya Tengah, Komp. Cigadung Greenland K-2 Bandung 40191	10
21	KAP Lydia & Lim	76/KM.1/2018	Jl. Muara Baru I No.19 Situsaer, Bojongloa Kidul Bandung 40234	18
22	KAP Moch. Zainuddin, Sukmadi& Rekan	695/KM.1/2013	Jl. Melong Asih No.69 B Lantai 2 Cijerah Bandung 40213	11
23	KAP Dr.Moh. Mansur Se.,Mm.,Ak	KEP1338/K M.1/2009	Turangga No.23 Bandung 40263	13
24	KAP Moh. Wildan	205/KM.1/2018	Gedung Tigaraksa Satria, Tbk Lantai 3 L. Jl. Soekarno Hatta No.606 Bandung 40286	16
25	KAP Nano Suyatna, S.E., AK., CPA	552/KM.1/2017	Griya Bandung Asri Blok F-5 No. 20 Jl. Ciganitri, Bojongsoang Bandung 40287	14
26	KAP Peddy HF. Dasuki	472/KM.1/2008	Jl. Jupiter Utama D.2 No.4 Margahayu Selatan Bandung 40286	17
27	KAP Drs.R.Hidayat Effendy	KEP-237/KM17/1999	Komplek Margahayu Raya. Jl. Tata Surya No 18 Bandung 40286	11
28	KAP Roebiandini & Rekan	684/KM.1/2008	Jl. Cikutra Baru VI No.49 Bandung 40124	19
29	KAP Drs.Ronald Haryanto	KEP051/KM.17/1999	Jl. Sukahaji No.36 A Bandung 40152	14
30	KAP Sabar & Rekan	1038/KM.1/2012	Jl. Saturnus Utara No.4 Margahayu Raya Bandung 40286	19
31	KAP Drs.Sanusi & Rekan	684/KM.1/2012	Jl. Prof. Surya Sumantri No.76 Bandung 40164	17
32	KAP Sugiono & Poulus Se.,Ak.,Mba	KEP077/KM.17/2000	Jl. Cempaka No.114 Kota Baru, Cibaduyut Bandung 40239	16
33	KAP Prof.Dr.H.Tb	KEP353/KM.	Metro Trade Center Block F	20

	Hasanudin, Msc & Rekan	6/2003	No.29 Jl. Soekarno Hatta No.590 Bandung 40286	
34	KAP Tanubrata Sutanto Fahmi & Rekan (Cabang)	966/KM.1/2016	Paskal Hyper Square Block B.62 Bandung 40181	19
35	KAP Dra.Yati Ruhiyati	KEP605/KM.17/1998	Jl. Ujung Berung Indah Berseri Block 9 No.4 Bandung 40611	17
<b>Jumlah Populasi</b>				<b>521 Auditor</b>

Sumber: Sumber: [http:// iapi-lib.com/directory-2020](http://iapi-lib.com/directory-2020)

Dari 35 Kantor Akuntan Publik di Kota Bandung, terdapat 6 KAP yang sudah tidak beroperasi atau telah berpindah lokasi. Jadi KAP yang masih beroperasi di Kota Bandung berjumlah 29 KAP, dari 29 KAP terdapat 9 KAP yang tidak terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK), jadi KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berjumlah 20 KAP.

### 3.3.2 Teknik Sampling

Menurut Sugiyono (2017:217) teknik sampling adalah sebagai berikut:

“Teknik sampling merupakan teknik pengambilan sampel. Untuk menentukan sampel yang akan digunakan dalam penelitian, terdapat berbagai teknik sampling yang digunakan.”

Dalam penelitian ini, teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Probability sampling* dengan menggunakan metode .

Sugiyono (2018:136) mendefinisikan *Non-probability sampling* adalah sebagai berikut:

“*Non-Probability sampling* adalah teknik pengambilan sampel yang tidak memberi peluang/kesempatan sama bagi setiap unsur (anggota) populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel.”

Sugiyono (2018:138) mendefinisikan *Purposive Sampling* adalah sebagai berikut:

“*Purposive Sampling* adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. teknik yang digunakan bila populasi mempunyai anggota/unsur yang tidak homogen dan berstrata secara proporsional”

Dalam penelitian ini yang menjadi sampel yaitu KAP dan auditor yang memenuhi kriteria tertentu. Adapun kriteria yang ditentukan sebagai pertimbangan dalam penelitian ini yaitu:

1. KAP di Kota Bandung yang aktif beroperasi
2. KAP di Kota Bandung yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
3. KAP yang memberi izin penulis melakukan penelitian
4. Auditor dengan level manajer, senior, dan supervisor

**Tabel 3. 5**  
**Purposive Sampling**

<b>Kriteria Sampel</b>	<b>Jumlah KAP</b>
KAP di Kota Bandung	35
Tidak memenuhi kriteria 1: KAP di Kota Bandung yang tidak aktif	(6)
Tidak memenuhi kriteria 2: KAP yang tidak terdaftar di OJK	(9)
Tidak memenuhi kriteria 3: KAP yang tidak mengizinkan untuk penelitian	(11)
<b>Total sampel KAP dengan jumlah auditor</b>	<b>9</b>
Auditor di 9 Kantor Akutan Publik di Kota Bandung	146
Tidak memenuhi kriteria: Auditor dengan level junior auditor	(110)
<b>Auditor yang dapat dijadikan Sampel Penelitian</b>	<b>36</b>

Sumber : diolah oleh penulis

### **3.3.3 Sampel Penelitian**

Menurut Sugiyono (2018:131) mendefinisikan sampel penelitian adalah sebagai berikut:

“Sampel penelitian adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Pengukuran sampel merupakan suatu langkah untuk menentukan besarnya sampel yang diambil dalam melaksanakan penelitian suatu objek. Untuk menentukan besarnya sampel bisa dilakukan dengan statistik atau berdasarkan estimasi penelitian. Pengambilan sampel ini harus dilakukan sedemikian rupa sehingga diperoleh sampel yang benar-benar dapat berfungsi atau dapat menggambarkan keadaan populasi yang sebenarnya, dengan istilah lain harus representatif (mewakili)”.

Berdasarkan populasi dan teknik sampling di atas, maka yang menjadi sampel adalah auditor yang bekerja pada 9 Kantor Akuntan Publik Kota Bandung yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Responden dibatasi pada KAP dengan level manajer, senior dan supervisor.

**Tabel 3. 6**  
**Sampel penelitian**

<b>No</b>	<b>Nama KAP</b>	<b>Jumlah auditor</b>	<b>Jumlah auditor berdasarkan kriteria</b>
<b>1</b>	KAP Prof.Dr.H.Tb Hasanudin, Msc & Rekan	20 Auditor	<b>4</b>
<b>2</b>	KAP Drs. Sanusi & Rekan	16 Auditor	<b>4</b>
<b>3</b>	KAP Sabar & Rekan	18 Auditor	<b>7</b>
<b>4</b>	KAP Koesbandijah, Beddy Samsi & Setiasih	17 Auditor	<b>4</b>
<b>5</b>	KAP Roebiandini & Rekan	19 Auditor	<b>3</b>
<b>6</b>	KAP AF. Rachman & Sotjipto WS	14 Auditor	<b>4</b>
<b>7</b>	KAP Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang & Ali (Cabang)	18 Auditor	<b>4</b>
<b>8</b>	KAP Djoemarna Wahyudin & Rekan	13 Auditor	<b>3</b>
<b>9</b>	KAP Dra. Yati Ruhiyati	11 Auditor	<b>3</b>
	<b>Jumlah auditor</b>	<b>146 Auditor</b>	<b>36 Auditor</b>

Sumber: diolah oleh penulis

### **3.4 Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data**

#### **3.4.1 Sumber Data**

Sumber data yang diperlukan oleh penulis dalam penelitian ini adalah data primer yaitu data penelitian yang diperoleh atau dikumpulkan langsung dari sumber asli (tanpa perantara).

Menurut Sugiyono (2018:213) pengertian sumber primer adalah:

“Sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.”

Pengumpulan data primer dalam penelitian ini yaitu dengan cara menyebarkan kuisisioner kepada responden secara langsung dengan pihak-pihak yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan yaitu beberapa Kantor Akuntan Publik (KAP) yang terdaftar di OJK Wilayah Kota Bandung yang telah ditetapkan oleh peneliti sebagai objek penelitian. Data primer ini diperoleh dari hasil pengisian kuisisioner yang diberikan kepada responden mengenai identitas responden (usia, jenis kelamin, jabatan, dan pendidikan) serta tanggapan responden berkaitan dengan tindakan supervisi auditor dan *time pressure* terhadap penghentian prematur atas prosedur audit.

#### **3.4.2 Teknik Pengumpulan Data**

Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan.

Menurut Sugiyono (2018:213) :

“Bila dilihat dari segi cara atau teknik pengumpulan data, maka teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan *interview* (wawancara), *Quisioner* (angket), *Observation* (pengamatan), dan gabungan ketiganya”.

Penjelasannya sebagai berikut:

a. *Interview* (wawancara)

Menurut Sugiyono (2018:214) “wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data, apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit/kecil.

b. *Quisioner* (angket)

Menurut Sugiyono (2018:219) “*Quisioner* merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya. Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang efisien bila peneliti tahu dengan pasti variabel yang akan diukur dan tahu apa yang bisa diharapkan dari responden. Selain itu, kuesioner juga cocok digunakan bila jumlah responden cukup besar dan tersebar di wilayah yang luas.”

c. *Observation* (pengamatan)

Menurut Sugiyono (2018:223) ”Teknik pengumpulan data dengan observasi digunakan bila penelitian berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan bila responden yang diamati tidak terlalu besar.”

Peneliti melakukan pengumpulan data dan dilengkapi oleh berbagai keterangan melalui Penelitian Lapangan (*Field Research*). Penelitian lapangan ini merupakan teknik pengumpulan data untuk mendapatkan data primer. Agar mendapatkan data yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, penulis menggunakan teknik pengumpulan melalui kuesioner. Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data dengan cara menggunakan daftar pertanyaan mengenai hal-hal yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

### **3.5 Rancangan Analisis Data dan Uji Hipotesis**

#### **3.5.1 Rancangan Analisis Data**

Menurut Sugiyono (2018:226) mendefinisikan analisis data adalah sebagai berikut:

“Analisis data merupakan kegiatan setelah data dari seluruh responden terkumpul. Kegiatan dalam analisis adalah mengelompokkan data berdasarkan variabel dan jenis responden, mentabulasi data berdasarkan variabel dari seluruh responden, menyajikan data tiap variabel yang diteliti, melakukan perhitungan untuk menjawab rumusan masalah, dan melakukan

perhitungan untuk menguji hipotesis yang telah diajukan.”

Analisis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan yang tercantum dalam rumusan masalah. Metode analisis data yang digunakan adalah metode analisis statistik dengan menggunakan program *Statistical Package for Social Sciences (SPSS)*.

### **3.5.1.1 Uji Validitas dan Reabilitas Instrumen**

#### **3.5.1.1.1 Uji Validitas Instrumen**

Menurut Sugiyono (2018:192) mendefinisikan valid sebagai berikut:

“Valid ialah apabila terdapat kesamaan antara data yang terkumpul dengan data yang sesungguhnya terjadi pada obyek yang diteliti.”

Suatu instrumen dinyatakan valid apabila mampu mengukur apa yang diinginkan dan dapat mengungkapkan data dari variabel yang diteliti secara tepat. Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui suatu data dapat dipercaya kebenarannya sesuai dengan kenyataan.

Sugiyono (2018:193) menyatakan bahwa:

“Instrumen yang valid berarti alat ukur yang digunakan untuk mendapatkan data (mengukur) itu valid. Valid berarti instrumentersebut dapat digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur.”

Uji validitas yang dilakukan bertujuan untuk mengetahui apakah alat ukur yang telah dirancang dalam bentuk kuesioner itu benar-benar dapat menjalankan fungsinya. Semua item pertanyaan dalam kuesioner harus diuji kebenarannya untuk menentukan valid atau tidaknya suatu item. Jika ada item yang tidak memenuhi syarat, maka item tersebut tidak akan diteliti lebih lanjut.

Menurut Sugiyono (2015:178), syarat minimum suatu item dianggap valid adalah:

- a. Jika nilai  $r \geq 0,30$  maka item-item pertanyaan dari kuesioner adalah valid

- b. Jika nilai  $r \leq 0,30$  maka item-item pertanyaan dari kuesioner dianggap tidak valid

Untuk menghitung korelasi pada uji validitas menggunakan korelasi *Pearson Product Moment* menurut Sugiyono (2015:248) yang dirumuskan sebagai berikut:

$$r_{xy} = \frac{n \sum xy - (\sum x)(\sum y)}{\sqrt{[n \sum x^2 - (\sum x)^2][n \sum y^2 - (\sum y)^2]}}$$

Keterangan:

- $r_{xy}$  = Koefisien korelasi pearson  
 $\sum xy$  = Jumlah perkalian variabel X dan Y  
 $\sum x$  = Jumlah nilai variabel X  
 $\sum y$  = Jumlah nilai variabel Y  
 $\sum x^2$  = Jumlah pangkat dua nilai variabel X  
 $\sum y^2$  = Jumlah pangkat dua nilai variable Y  
n = Banyaknya sampel

### 3.5.1.1.2 Uji Reabilitas Instrumen

Uji reliabilitas dilakukan untuk mengetahui apakah alat pengumpulan data menunjukkan tingkat ketepatan, tingkat keakuratan, kestabilan atau konsistensi dalam mengungkapkan gejala tertentu.

Menurut Sugiyono (2018:193) menyatakan bahwa:

“Instrumen yang reliabel adalah instrumen yang bila digunakan beberapa kali untuk mengukur obyek yang sama, akan menghasilkan data yang sama.”

Instrumen dikatakan reliabel jika alat ukur tersebut menunjukkan hasil yang konsisten, sehingga instrumen ini dapat digunakan dengan aman karena dapat bekerja sama dengan baik pada waktu dan kondisi yang berbeda. Uji reliabilitas dapat dilakukan secara bersama-sama terhadap seluruh butir pernyataan. Adapun kriteria untuk menilai reliabilitas instrumen penelitian ini.

1. Jika nilai Alpha  $\geq 0,6$  maka instrument bersifat reliabel.
2. Jika nilai Alpha  $\leq 0,6$  maka instrument tidak reliabel.

Maka koefisien korelasinya dimasukan kedalam rumus Spearmen Brown sebagai berikut :

$$r = \frac{2 \cdot rb}{1 + rh}$$

**Keterangan :**

r = Nilai reabilitas

rb = Korelasi *product moment* antara belahan pertama dan belahan kedua

### **3.5.1.2 Rancangan Analisis Deskriptif**

Menurut Sugiyono (2017:147) Analisis Deskriptif adalah sebagai berikut:

“Analisis deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi”.

Dalam analisis deskriptif penulis melakukan pembahasan mengenai rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Tindakan Supervisi Auditor pada Kantor Akuntan Publik di Kota Bandung

2. Bagaimana *Time Pressure* pada Kantor Publik di Kota Bandung
3. Bagaimana Penghentian Prematur atas Prosedur Audit pada Kantor Akuntan Publik di Kota Bandung

Adapun langkah-langkah yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Penulis melakukan pengumpulan data dengan cara sampling, di mana yang diselidiki adalah sampel dari pengukuran yang dipilih dari populasi yang menjadi perhatian dalam penelitian.
2. Setelah metode pengumpulan data ditentukan, kemudian menentukan alat untuk memperoleh data dari elemen-elemen yang akan diselidiki. Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner untuk menentukan nilai dari kuesioner tersebut, penulis menggunakan skala likert. Menurut Sugiyono (2017:93) mendefinisikan skala *likert* sebagai berikut: “Skala *likert* yaitu skala yang digunakan untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial”.
3. Menyusun kuesioner dengan skala penilaiannya masing-masing, kemudian disebarkan ke kantor akuntan publik yang telah ditetapkan. Setiap item dari kuesioner memiliki nilai/skor 1 sampai dengan 5 dengan menggunakan skor skala *likert* sebagai berikut:

**Tabel 3. 7**

**Skor Skala Likert**

No	Pilihan Jawaban	pertanyaan	
		positif	negatif
1	Sangat Setuju/ Selalu/ Sangat Positif	5	1
2	Setuju/ Sering/ Positif	4	2
3	Ragu-ragu/ Kadang/ Netral	3	3
4	Tidak setuju/ Kurang Setuju/ Jarang/ Positif	2	4
5	Sangat Tidak Setuju/ Tidak Pernah/ Sangat Negatif	1	5

Sumber: Sugiyono, (2018:153)

4. Mengumpulkan kuesioner yang telah diisi oleh responden untuk dapat diolah menjadi data yang dapat diinformasikan.
5. Apabila data terkumpul, kemudian dilakukan pengolahan data, disajikan dan dianalisis dengan menggunakan program software pengolah data. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan uji statistik untuk menilai variabel X

dan variabel Y, maka analisis yang digunakan berdasarkan rata-rata (mean) dari masing-masing variabel. Nilai rata-rata (mean) ini diperoleh dengan menjumlahkan data keseluruhan dalam setiap variabel, kemudian dibagi dengan jumlah responden.

Untuk rumus rata-rata atau mean adalah sebagai berikut:

$$\text{Untuk variabel X} = \text{Me} \frac{\sum x_i}{n}$$

$$\text{Untuk variabel Y} = \text{Me} \frac{\sum y_i}{n}$$

Keterangan:

Me = Rata-rata

$\sum x_i$  = Jumlah Nilai X ke-i sampai ke-n

$\sum y_i$  = Jumlah Nilai Y ke-i sampai ke-n

n = Jumlah responden yang akan dirata-rata

Setelah diperoleh rata-rata dari masing-masing variabel kemudian dibandingkan dengan kriteria yang telah ditentukan berdasarkan nilai terendah dan nilai tertinggi dari hasil kuesioner. Nilai tertinggi dan terendah itu masing-masing peneliti ambil dari banyaknya pernyataan dalam kuesioner dikalikan dengan nilai terendah (1) dan nilai tertinggi (5) yang telah ditetapkan.

Nilai tertinggi = Jumlah pertanyaan x 5

Nilai terendah = Jumlah pertanyaan x 1

Kelas Interval = Nilai tertinggi – Nilai terendah : 5

### **1. Kriteria untuk variabel Tindakan supervisi auditor (X<sub>1</sub>)**

Untuk menilai variabel tindakan supervisi dengan banyaknya pertanyaan dalam kuesioner adalah 10 pertanyaan, nilai tertinggi dikalikan 5 (lima) dan nilai terendah dikalikan 1 (satu), sehingga:

Skor tertinggi =  $(10 \times 5) = 50$

Skor terendah =  $(10 \times 1) = 10$

Dengan perhitungan kelas interval =  $(50 - 10) : 5 = 8$

Berdasarkan perhitungan tersebut penulis menetapkan kriteria untuk tindakan supervisi sebagai berikut:

**Tabel 3.8**  
**Kriteria Penilaian Tindakan Supervisi auditor (X1)**

<b>Rentang Nilai</b>	<b>Kriteria</b>
10,00 – 18,00	Tidak Baik
18,01 – 26,00	Kurang Baik
26,01 – 34,00	Cukup Baik
34,01 – 42,00	Baik
42,01 – 50,00	Sangat Baik

Sumber: Data diolah penulis

## **2. Kriteria untuk variabel *Time Pressure* (X2)**

Untuk menilai variabel *Time pressure* dengan banyaknya pertanyaan dalam kuesioner adalah 4 pertanyaan, nilai tertinggi dikalikan 5 (lima) dan nilai terendah dikalikan 1 (satu), sehingga

Skor tertinggi =  $(4 \times 5) = 20$

Skor terendah =  $(4 \times 1) = 4$

Dengan perhitungan kelas interval  $(20-4):5 = 3,2$

Berdasarkan perhitungan tersebut penulis menetapkan kriteria untuk *Time pressure* (X2) sebagai berikut:



**Tabel 3. 9**

**Kriteria Penilaian *Time pressure* (X<sub>2</sub>)**

<b>Rentang Nilai</b>	<b>Kriteria</b>	<b>kesimpulan</b>
4,00 – 7,20	Sangat tertekan	Tidak baik
7,21– 10,40	Tertekan	Kurang baik
10,41 – 13,60	Cukup tertekan	Baik
13,61 – 16,80	Kurang tertekan	Cukup baik
16,81 – 20,00	Tidak tertekan	Sangat baik

Sumber: Data diolah penulis

**3. Kriteria untuk variabel Penghentian Prematur atas Prosedur Audit (Y)**

Untuk menilai variabel penghentian prematur atas prosedur audit dengan banyaknya pertanyaan dalam kuesioner adalah 10 pertanyaan. nilai tertinggi dikalikan 5 (lima) dan nilai terendah dikalikan 1 (satu), sehingga:

$$\text{Skor tertinggi} = (10 \times 5) = 50$$

$$\text{Skor terendah} = (10 \times 1) = 10$$

$$\text{Dengan perhitungan kelas interval } (50-10):5 = 8$$

Berdasarkan perhitungan tersebut penulis menetapkan kriteria untuk penghentian prematur atas prosedur audit (Y) sebagai berikut:

**Tabel 3. 10**

**Kriteria Penilaian Penghentian Prematur atas Prosedur Audit (Y)**

<b>Rentang Nilai</b>	<b>Kriteria</b>	<b>kesimpulan</b>
----------------------	-----------------	-------------------

10,00 – 18,00	Sangat Prematur	Tidak baik
18,01 – 26,00	Prematur	Kurang baik
26,01 – 34,00	Cukup Prematur	Baik
34,01 – 42,00	Kurang Prematur	Cukup baik
42,01 – 50,00	Tidak Prematur	Sangat baik

Sumber: Data diolah penulis

### 3.5.1.3 Rancangan Analisis Verifikatif

Analisis verifikatif merupakan metode penelitian yang digunakan untuk mencari kebenaran dari hipotesis yang diajukan, yaitu penulis menggunakan analisis verifikatif untuk menganalisis:

1. Seberapa besar pengaruh tindakan supervisi auditor terhadap penghentian premature atas prosedur audit pada auditor Kantor Akuntan Publik (KAP) di Wilayah Kota Bandung yang terdaftar di OJK.
2. Seberapa besar pengaruh *time pressure* terhadap penghentian premature atas prosedur audit pada auditor yang bekerja pada Kantor Akuntan Publik (KAP) di Wilayah Kota Bandung yang terdaftar di OJK.
3. Seberapa besar pengaruh tindakan supervisi auditor dan *time pressure* secara simultan terhadap penghentian premature atas prosedur audit pada Kantor Akuntan Publik (KAP) di Wilayah Kota Bandung yang terdaftar di OJK.

Analisis ini digunakan untuk menunjukkan hubungan antara variabel bebas (X) dengan variabel terikat (Y).

### **3.5.1.3.1 Analisis Regresi Linier Berganda**

Dalam penelitian ini terdapat lebih dari satu variabel independen yang akan diuji pengaruhnya, maka untuk mengetahui pengaruhnya terhadap variabel dependen digunakan analisis regresi linier berganda. Variabel independen terdiri dari tindakan supervisi, *time pressure*. Sedangkan variabel dependennya adalah penghentian prematur atas prosedur audit.

Menurut Sugiyono (2016:192) Rumus regresi berganda yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + e$$

Dimana:

Y = Variabel Terikat (Penghentian Prematur atas Prosedur Audit)

a = Bilangan Konstanta

$b_1, b_2$  = Koefisien Arah Garis

$X_1$  = Variabel Bebas (Tindakan supervisi)

$X_2$  = Variabel Bebas (*Time pressure*)

e = error term

### **3.5.1.3.2 Analisis Koefisien Korelasi**

Analisis koefisien korelasi bertujuan untuk menunjukkan arah dan kuatnya hubungan antara masing-masing variabel. Dinyatakan dalam bentuk hubungan positif

dan negatif, sedangkan kuat atau lemahnya hubungan dinyatakan dalam besarnya koefisien korelasi. Untuk mengetahui apakah terdapat hubungan yang positif atau negative antara masing masing variabel, maka penulis menggunakan rumusan korelasi *Person Product Moment*, menurut Sugiyono (2017:183) rumus korelasi *Person Product Moment* adalah sebagai berikut:

$$r_{xy} = \frac{n\sum X_i Y_i - (\sum X_i)(\sum Y_i)}{\sqrt{\{n\sum X_i^2 - (\sum X_i)^2\}\{n\sum Y_i^2 - (\sum Y_i)^2\}}}$$

Keterangan :

$r_{xy}$ = Koefisien korelasi *pearson*

$X_i$ = Variabel independen

$Y_i$ = Variabel dependen

$n$ = Banyak sampel

Pada dasarnya, Pada dasarnya, nilai dapat bervariasi dari -1 sampai dengan +1 atau secara sistematis dapat ditulis  $-1 < r < +1$ .

- a. Bila  $r = 0$  atau mendekati nol, maka hubungan antara kedua variabel sangat lemah atau tidak terdapat hubungan sama sekali sehingga tidak mungkin terdapat pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen.
- b. Bila  $0 < r < 1$ , maka korelasi antara kedua variabel dapat dikatakan positif atau bersifat searah, dengan kata lain kenaikan atau penurunan nilai-nilai variabel independen terjadi bersama-sama dengan kenaikan atau penurunan nilai-nilai variabel dependen.
- c. Bila  $-1 < r < 0$ , maka korelasi antara kedua variabel dapat dikatakan negatif atau bersifat berkebalikan, dengan kata lain kenaikan nilai-nilai variabel independen akan terjadi bersama-sama dengan penurunan nilai variabel dependen atau sebaliknya.

Untuk melihat hubungan atau korelasi, penulis menggunakan analisis menurut Sugiyono (2018:274) yaitu sebagai berikut:

**Tabel 3. 11**  
**Interpretasi Koefisien Korelasi**

<b>Besarnya Pengaruh</b>	<b>Tingkat Hubungan</b>
0,00-0,199	Sangat rendah
0,20-0,399	Rendah
0,40-0,599	Sedang
0,60-0,799	Kuat
0,80-1,000	Sangat kuat

Sumber : diolah oleh penulis

### **3.5.2 Rancangan Uji Hipotesis**

#### **3.5.2.1 Penetapan Hipotesis Nol ( $H_0$ ) dan Hipotesis Alternatif ( $H_a$ )**

Menurut Sugiyono (2016:93) menyatakan bahwa:

“Hipotesis adalah Jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan dikatakan sementara karena jawaban yang diberikan hanya didasarkan pada teori relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data.”

Rancangan pengujian hipotesis digunakan untuk mengetahui korelasi yang dalam hal ini adalah korelasi tindakan supervisi dan *time pressure* terhadap penghentian premature atas prosedur audit dengan menggunakan perhitungan statistik. Berdasarkan rumusan masalah, maka diajukan hipotesis sebagai jawaban sementara yang akan diuji dan dibuktikan kebenarannya. Rumusan hipotesis adalah sebagai berikut:

H01: ( $\beta_1 \leq 0$ ), artinya Tindakan Supervisi auditor tidak terdapat pengaruh

Positif terhadap Penghentian Prematur atas Prosedur Audit.

Ha1: ( $\beta_1 > 0$ ), artinya Tindakan Supervisi auditor terdapat pengaruh Positif terhadap Penghentian Prematur atas Prosedur Audit.

H02: ( $\beta_1 \leq 0$ ), artinya *Time Pressure* tidak terdapat pengaruh Positif terhadap Penghentian Prematur atas Prosedur Audit.

Ha2: ( $\beta_1 > 0$ ), artinya *Time Pressure* terdapat pengaruh Positif terhadap Penghentian Prematur atas Prosedur Audit.

H03: ( $\beta_1 \leq 0$ ), artinya Tindakan Supervisi auditor dan *Time Pressure* tidak terdapat pengaruh Positif secara simultan terhadap Penghentian Prematur atas Prosedur Audit.

Ha3: ( $\beta_1 > 0$ ), artinya Tindakan Supervisi auditor dan *Time Pressure* terdapat pengaruh Positif secara simultan terhadap Penghentian Prematur atas Prosedur Audit.

### **3.5.2.2 Uji Statistik t (Uji Parsial)**

Uji *t* berarti melakukan pengujian terhadap koefisien secara parsial. Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui signifikansi peranan variabel independen terhadap variabel dependen diuji dengan uji-*t* satu, taraf kepercayaan 95%, kriteria pengambilan keputusan untuk melakukan penerimaan atau penolakan setiap hipotesis adalah dengan cara melihat signifikansi harga *t-hitung* setiap variabel independen atau membandingkan nilai *t-hitung* dengan nilai yang ada pada *t-tabel*, maka  $H_0$  diterima dan sebaiknya *t-hitung* tidak signifikan dan berada dibawah *t-tabel*, maka  $H_0$  ditolak. Uji *t* atau parsial ini untuk melihat hubungan:

1. Pengaruh Tindakan Supervisi Terhadap Penghentian Premature Atas Prosedur Audit
2. Pengaruh *Time Pressure* Terhadap Penghentian Premature Atas Prosedur

Adapun langkah-langkah dalam melakukan uji *t* adalah sebagai berikut:

1. Menentukan model keputusan dengan menggunakan statistic uji *t*, dengan melihat asumsi sebagai berikut:
  - a. Interval keyakinan  $\alpha = 0,05$
  - b. Derajat kebebasan =  $n-k-1$
  - c. Kaidah keputusan: Tolak  $H_0$  (terima  $H_a$ ), jika  $t_{hitung} > t_{tabel}$   
Terima  $H_0$  (tolak  $H_a$ ), jika  $t_{hitung} < t_{tabel}$

Apabila  $H_0$  diterima, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat suatu pengaruh atau tidak berpengaruh, sedangkan apabila  $H_0$  ditolak maka pengaruh variabel independen terhadap dependen adalah signifikan.

2. Menentukan  $t_{hitung}$  dengan menggunakan statistic uji *t*, dengan rumus sebagai berikut:

$$t = \frac{r\sqrt{n-2}}{\sqrt{1-r^2}}$$

Keterangan:

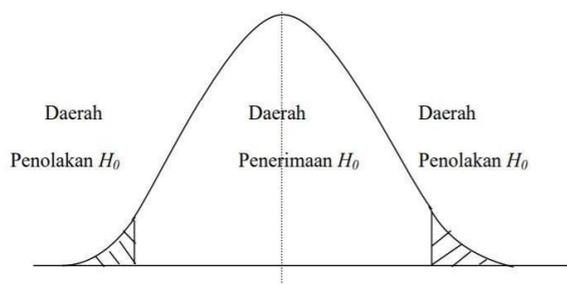
$r$  = koefisien korelasi

$t$  = nilai koefisien korelasi dengan derajat bebas (dk) =  $n-k-1$

$r^2$  = koefisien determinasi

$n$  = jumlah sampel

3. Membandingkan  $t_{hitung}$  dengan  $t_{tabel}$



**Gambar 3. 2 Uji T**

(Sumber: Sugiyono, 2016:185)

Distribusi  $t$  ini ditentukan oleh derajat kesalahan  $dk = n-2$ . Kriteria yang digunakan adalah sebagai berikut:

- a.  $H_0$  ditolak jika  $t_{hitung} > t_{tabel}$  atau  $-t_{hitung} < -t_{tabel}$  atau  $sig, < \alpha$
- b.  $H_0$  diterima jika  $t_{hitung} < t_{tabel}$  atau  $-t_{hitung} > -t_{tabel}$  atau  $sig, > \alpha$

Pengujian statistik menunjukkan  $H_0$  ditolak, maka berarti variabel-variabel independen secara parsial mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen Penghentian Premature atas Prosedur Audit. Tetapi apabila  $H_0$  diterima, maka berarti variabel-variabel independen tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Penghentian Premature atas Prosedur Audit.

### 3.5.2.3 Uji Statistik F (Uji Simultan)

Uji F adalah pengujian terhadap koefisien regresi secara simultan. Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh semua variabel independen yang terdapat di dalam model secara bersama-sama (simultan) terhadap variabel dependen. Uji F dalam penelitian ini digunakan untuk menguji pengaruh tindakan supervisi dan *time pressure* terhadap penghentian prematur atas prosedur audit secara simultan dan parsial.

Menurut Sugiyono (2014:257) rumusan pengujian sebagai berikut:

$$F_h = \frac{R^2/k}{(1 - R^2)/(n - k - 1)}$$

Keterangan:

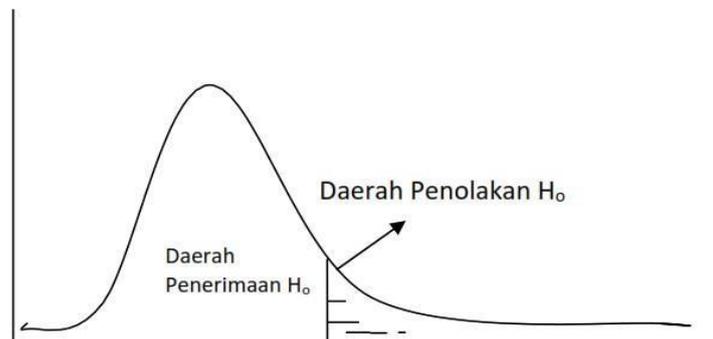
$F_n$  = Nilai uji F

$R^2$  = Koefisien korelasi berganda

$k$  = Jumlah variabel independen

$n$  = Jumlah anggota sampel

Setelah mendapat nilai  $F_{hitung}$  ini, kemudian dibandingkan dengan nilai  $F_{tabel}$  dengan tingkat signifikan sebesar 5% atau 0,05. Artinya kemungkinan besar dari hasil kesimpulan memiliki probabilitas 95% atau korelasi kesalahan sebesar 5%.



**Gambar 3. 3 Uji F**

**Sumber: Sugiyono (2016:187)**

Dalam uji  $F$  tingkat signifikan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 0,95 atau 95% dengan  $\alpha = 0,05$  atau 5%. Bisa juga dengan *degree freedom* =  $n-k-1$  dengan kriteria sebagai berikut:

- a.  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima jika  $F_{hitung} > F_{tabel}$  atau nilai Sig  $< \alpha$
- b.  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak jika  $F_{hitung} < F_{tabel}$  atau nilai Sig  $> \alpha$

Jika terjadi penerimaan  $H_0$ , maka dapat diartikan sebagai tidak signifikannya model regresi berganda yang diperoleh sehingga mengakibatkan tidak signifikan pula pengaruh dari variabel-variabel bebas secara simultan terhadap variabel terikat.

#### **3.5.2.4 Analisis Koefisien Determinasi ( $R^2$ )**

Analisis koefisien determinasi untuk mengetahui dan menguji seberapa besar pengaruh variabel independen (X) terhadap variabel dependen (Y).

Besarnya koefisien determinasi dapat dihitung menggunakan rumus yaitu sebagai berikut:

$$Kd = r^2 \times 100\%$$

Dimana:

Kd = Koefisien Determinasi

$r^2$  = Koefisien Korelasi Ganda

### 3.5.2.5 Analisis Koefisien Derteminasi Parsial

Koefisien derteminasi parsial digunakan untuk mengetahui seberapa besar presentase pengaruh secara parsial per sub variabel tindakan supervisi auditor (x1) dan *time pressure* (x2) terhadap penghentian prematur atas prosedur audit (Y), maka dapat diketahui dengan cara mengkalikan nilai *standardized coefficients beta* dengan *correlations (zero order)*, yang mengacu pada hasil perhitungan dengan menggunakan *software SPSS for windows*. Rumus koefisien determinasi yang dikemukakan oleh Gujarati (2006:172) adalah sebagai berikut :

$$KD = \beta \times \text{zero order} \times 100\%$$

Keterangan :

$\beta$  : Beta (nilai *standardized coefficients*)

Zero order : matriks korelasi variabel bebas dengan variabel terikat

Dimana apabila :

Kd : 0, Berarti pengaruh variabel X terhadap variabel Y, lemah

Kd : 1, Berarti pengaruh variabel X terhadap variabel Y, kuat

### 3.6 Rancangan Kuisisioner

Menurut Sugiyono (2018:219) pengertian kuesioner adalah sebagai berikut:

“Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya”.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis kuesioner tertutup yaitu kuesioner yang dibagikan kepada setiap responden dengan pertanyaan yang mengharapkan jawaban singkat atau responden dapat memilih salah satu jawaban alternatif dari pertanyaan yang telah tersedia.

Berdasarkan judul penelitian, kuesioner akan dibagikan kepada auditor yang bekerja pada Kantor Akuntan Publik di Wilayah Kota Bandung yang terdaftar di OJK. Kuesioner ini berisi pertanyaan mengenai variabel tindakan supervisi dan *time pressure* sebagaimana yang tercantum pada operasionalisasi variabel. Semua pertanyaan kuesioner ini ada 22 item yang terdiri dari 8 (sepuluh) pertanyaan untuk Tindakan Supervisi Auditor (X1), 4 (empat) pertanyaan untuk *Time Pressure* (X2), dan 10 (sepuluh) pertanyaan untuk Penghentian prematur atas prosedur audit (Y).